



Cendekiawan  
Inovasi  
Digital  
Indonesia



# PENGANTAR AKUNTANSI



Winda Ayu Virginia, Andriani Saputri, Herlina Ilyas,  
Hesti Setiorini, Olga Theolina Sitorus, Ayu Desita Sari,  
Amalina Nur Arifah

# **PENGANTAR AKUNTANSI**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# PENGANTAR AKUNTANSI

Winda Ayu Virginia  
Andriani Saputri  
Herlina Ilyas  
Hesti Setiorini  
Olga Theolina Sitorus  
Ayu Desita Sari  
Amalina Nur Arifah



Cendekiawan  
Inovasi  
Digital  
Indonesia

# PENGANTAR AKUNTANSI

## Penulis:

Winda Ayu Virginia  
Andriani Saputri  
Herlina Ilyas  
Hesti Setiorini  
Olga Theolina Sitorus  
Ayu Desita Sari  
Amalina Nur Arifah

Editor: Akbar Iskandar

Desain Sampul: Tim Kreatif Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia

Ukuran: viii, 120 hlm, 15.5cm x 23 cm

ISBN: 978-623-09-6689-7

Cetakan Pertama, November 2023

Copyright © 2023 by Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini dan dengan cara  
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Penerbit: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia

Jl. Lembo, Rt.05/Rw.01, No.175 Makassar, Kel. Lembo, Kec. Tallo,  
Sulawesi, Indonesia, 90213

Telp: +6285255726616

Website: <https://penerbit.ceddi.id/>

**E-mail: [press.ceddi@gmail.com](mailto:press.ceddi@gmail.com)**

# KATA PENGANTAR

Selamat datang dalam buku "Pengantar Akuntansi" ini. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dasar yang kokoh mengenai ilmu akuntansi, yang merupakan landasan utama dalam dunia bisnis, keuangan, dan manajemen. Dalam halaman-halaman berikut, Anda akan diajak untuk memahami konsep-konsep dasar akuntansi, metode pencatatan transaksi keuangan, serta peranan penting akuntansi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan aspek finansial.

Akuntansi adalah bahasa bisnis yang memungkinkan entitas bisnis, baik perusahaan besar maupun usaha kecil, untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan kinerja keuangan mereka. Melalui buku ini, Anda akan belajar cara menjurnal transaksi, menyusun laporan keuangan, mengerti prinsip-prinsip dasar yang mengatur akuntansi, serta memahami bagaimana akuntansi berkontribusi dalam mengambil keputusan strategis.

Saat ini, pemahaman akuntansi sangat penting dalam berbagai profesi dan bidang, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan, dan kewirausahaan. Oleh karena itu, kami harap buku ini akan membantu Anda memahami dasar-dasar akuntansi dan membuka pintu menuju dunia yang lebih luas, di mana Anda dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.

Buku ini membahas:

Bab 1 Konsep Dasar Akuntansi

Bab 2 Prinsip Akuntansi dan Standar Akuntansi

Bab 3 Siklus Akuntansi dan Jurnal Umum

Bab 4 Laporan Keuangan

Bab 5 Analisis Rasio Keuangan

Bab 6 Anggaran Modal dan Analisis Investasi

Bab 7 Pajak dan Akuntansi Pajak

Terima kasih telah memilih buku ini sebagai panduan awal Anda dalam memahami akuntansi. Selamat membaca, dan semoga buku ini bermanfaat dalam perjalanan Anda untuk menguasai ilmu akuntansi.

Salam Hormat

[Penulis]

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI.....</b>	<b>1</b>
1.1 SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI.....	1
1.2 DEFINISI, PERANAN DAN MANFAAT AKUNTANSI .....	4
1.3 PRINSIP DASAR AKUNTANSI.....	8
1.4 BIDANG-BIDANG AKUNTANSI.....	11
1.5 PROSES AKUNTANSI .....	12
1.6 KETERBATASAN AKUNTANSI .....	14
<b>BAB 2 PRINSIP AKUNTANSI DAN STANDAR AKUNTANSI.....</b>	<b>17</b>
2.1 PENDAHULUAN .....	17
2.2 PRINSIP AKUNTANSI .....	17
2.3 STANDAR AKUNTANSI .....	21
2.4 IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTANSI DAN STANDAR AKUNTANSI .....	29
<b>BAB 3 SIKLUS AKUNTANSI DAN JURNAL UMUM.....</b>	<b>33</b>
3.1 PENDAHULUAN .....	33
3.2 SIKLUS AKUNTANSI.....	34
3.3 JURNAL UMUM.....	42
<b>BAB 4 LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 PENDAHULUAN .....	45
4.2 DEFINISI LAPORAN KEUANGAN .....	46
4.3 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN .....	46
4.4 KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN .....	47
4.5 JENIS LAPORAN KEUANGAN.....	49
<b>BAB 5 ANALISIS RASIO KEUANGAN.....</b>	<b>65</b>
5.1 PENDAHULUAN .....	65
5.2 JENIS-JENIS RASIO KEUANGAN.....	66
5.3 BAHAN EVALUASI .....	72
<b>BAB 6 ANGGARAN MODAL DAN ANALISIS INVESTASI.....</b>	<b>79</b>
6.1 PENDAHULUAN .....	79
6.2 STRUKTUR MODAL.....	80
6.3 ARUS KAS .....	84
6.4 KEPUTUSAN INVESTASI.....	84
6.5 PORTOFOLIO.....	86
6.6 PASAR MODAL.....	88
6.7 <i>RETURN</i> DAN RISIKO PORTOFOLIO.....	89
<b>BAB 7 PAJAK DAN AKUNTANSI PAJAK .....</b>	<b>91</b>
7.1 KONSEP DASAR PAJAK.....	91

7.2 KETENTUAN TATA CARA PERPAJAKAN .....	93
7.3 PAJAK PENGHASILAN .....	96
7.4 PAJAK KHUSUS .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>117</b>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1: Tahapan dalam siklus akuntansi.....	35
--	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 7. 1: Tarif yang ditetapkan pada UU PPh Pasal .....	98
Tabel 7. 2: Tarif PPh Pasal 23 .....	100
Tabel 7. 3: Perhitungan PPh Pasal 25 .....	102
Tabel 7. 4: Perbedaan Bea Materai Lama dan Baru .....	111

# Bab 1

## Konsep Dasar Akuntansi

### 1.1 Sejarah Perkembangan Akuntansi

#### 1.1.1. Sejarah Perkembangan Akuntansi Dunia

Sejarah akuntansi adalah cerita tentang perkembangan dan evolusi sistem akuntansi dari zaman kuno hingga zaman modern. Akuntansi telah ada sejak manusia mulai melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Sejarah akuntansi dapat diketahui sejak zaman kuno dimana manusia pertama kali terlibat dalam aktivitas ekonomi serta perdagangan. Praktik akuntansi awalnya muncul sebagai respons terhadap kebutuhan manusia untuk mencatat transaksi keuangan mereka.

Salah satu peradaban yang memiliki sistem akuntansi tertua adalah peradaban Mesir Kuno. Mereka menggunakan sistem pencatatan sederhana untuk mencatat jumlah gandum dan ternak yang dimiliki pemerintah serta mencatat pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat. Pada zaman kuno, masyarakat seperti Mesir Kuno, Babilonia, Yunani Kuno, dan Romawi telah mengembangkan sistem pencatatan sederhana untuk melacak dan mengelola aset dan kewajiban mereka. Mereka menggunakan metode seperti penyusunan daftar aset, pencatatan transaksi, dan pembukuan sederhana.

Selama periode Abad Pertengahan, gereja dan biara memiliki peran signifikan dalam evolusi akuntansi. Di abad ke-15, terjadi perkembangan sistem akuntansi di Italia. Pada masa itu, muncul sistem pencatatan yang dikenal sebagai metode "partita dobrée" atau double-entry bookkeeping. Inovasi ini dikembangkan oleh seorang frater bernama Luca Pacioli dalam

karyanya yang terkenal, "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita" yang diterbitkan pada tahun 1494. Metode pencatatan ini mengakui prinsip bahwa setiap transaksi memiliki pengaruh ganda, yakni debit dan kredit (Baridwan, 2000).

Selanjutnya, selama Revolusi Industri pada abad ke-18, sistem akuntansi berkembang lebih lanjut. Dengan munculnya Revolusi Industri pada abad ke-18 dan ke-19, perusahaan yang lebih besar dan kompleks muncul. Perusahaan-perusahaan besar mulai membutuhkan sistem akuntansi yang lebih canggih untuk mengelola transaksi yang semakin kompleks. Pada saat ini, muncul konsep akuntansi manajemen yang memberikan informasi yang lebih rinci kepada manajemen perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan. Hal ini memicu perkembangan lebih lanjut dalam bidang akuntansi. Penggunaan teknologi, seperti mesin tik dan telegraf, mempermudah proses pencatatan dan pertukaran informasi keuangan.

Pada awal abad ke-20, institusi dan organisasi profesional mulai mengembangkan standar akuntansi untuk memastikan konsistensi dan keandalan laporan keuangan. Salah satu contoh penting adalah pendirian Financial Accounting Standards Board (FASB) di Amerika Serikat pada tahun 1973, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standards, FAS) yang menjadi pedoman bagi praktik akuntansi di AS. Standar-standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat dipahami dan dibandingkan secara konsisten (Sofyan Syafri Harahap, 2011).

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi, terutama komputer dan perangkat lunak akuntansi, telah mengubah cara akuntansi dilakukan. Penggunaan komputer memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat, penyimpanan yang efisien, dan kemampuan analisis yang lebih baik. Penggunaan komputer dan perangkat lunak akuntansi telah mempermudah proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Selain itu, konsep-konsep baru seperti akuntansi berbasis nilai pasar (fair value accounting) dan akuntansi berkelanjutan (sustainability accounting) mulai muncul untuk mengakomodasi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek non-keuangan dari perusahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, harmonisasi standar akuntansi internasional menjadi fokus utama. International Financial Reporting Standards (IFRS) diperkenalkan oleh International Accounting Standards

Board (IASB) untuk menciptakan konsistensi global dalam pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, sejarah akuntansi mencerminkan evolusi sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dari metode sederhana menjadi sistem yang lebih kompleks dan terstandarisasi. Perkembangan teknologi dan globalisasi terus mempengaruhi perkembangan akuntansi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang di era modern. Sejarah akuntansi terus berkembang sejalan dengan perubahan kebutuhan ekonomi dan regulasi. Peran akuntansi dalam menyediakan informasi keuangan yang andal dan transparan tetap menjadi landasan bagi pengambilan keputusan ekonomi di masa sekarang dan yang akan datang.

### **1.1.2. Sejarah Perkembangan Akuntansi di Indonesia**

Pekembangan akuntansi di Indonesia telah mengalami berbagai tahapan dan transformasi. Perkembangan akuntansi di Indonesia terus berlanjut seiring dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan global. Pemerintah dan organisasi profesi terus bekerja untuk meningkatkan praktik akuntansi, menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era modern. Berikut adalah beberapa momen penting dalam perkembangan akuntansi di Indonesia:

1. Era Kolonial: Pada masa penjajahan Belanda, penggunaan akuntansi mulai diperkenalkan di Indonesia. Pada tahun 1912, Belanda mengeluarkan "Vereenvoudigde Boekhouding voor Inlandsche Nijverheids-Ondernemingen" yang merupakan pedoman akuntansi untuk perusahaan-perusahaan pribumi. Namun, penggunaannya terbatas dan belum meluas.
2. Era Kemerdekaan: Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1954, pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Akuntan Indonesia (LAI) sebagai badan pengatur profesi akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1961, LAI mengadopsi standar akuntansi yang didasarkan pada standar Amerika Serikat dan Belanda.
3. Era Standarisasi: Pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia memperkenalkan standar akuntansi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia diperkenalkan untuk mengatur praktik akuntansi di Indonesia.
4. Konvergensi ke IFRS: Pada tahun 2008, Indonesia mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) sebagai

- standar akuntansi nasional yang menggantikan SAK Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mencapai konsistensi dan kesesuaian dengan standar internasional.
5. Pembentukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembentukan Profesi Akuntan: Pada tahun 2009, pemerintah membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembentukan Profesi Akuntan (BPKPAP) untuk mengatur profesi akuntan di Indonesia. BPKPAP kemudian berubah nama menjadi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2011.
  6. Penyempurnaan Standar Akuntansi: IAI terus melakukan penyempurnaan dan pengembangan standar akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) saat ini di Indonesia telah mengadopsi sebagian besar IFRS, dengan beberapa penyesuaian dan kebijakan khusus untuk kondisi dan kebutuhan Indonesia.

## **1.2 Definisi, Peranan dan Manfaat Akuntansi**

### **1.2.1 Definisi Akuntansi**

Secara literal, akuntansi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang disebut "accounting," yang mengindikasikan tindakan penghitungan. Dalam perekaman transaksi keuangan, seorang ahli akuntansi akan membedakan transaksi tersebut ke dalam berbagai 'akun', seperti misalnya kas, piutang, utang dagang, dan sejumlah akun lainnya.

Berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntansi adalah kemampuan dalam mencatat serta merangkum informasi transaksi keuangan untuk kemudian menganalisis dampak dari transaksi tersebut terhadap suatu entitas ekonomi, entah itu individu maupun organisasi.

Akuntansi adalah suatu sistem yang dipergunakan dalam menghimpun, mencatat, mengelompokkan, menganalisis, serta menyampaikan data keuangan dari suatu badan usaha atau entitas. Proses ini mencakup pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan penyediaan informasi yang penting bagi pihak yang menggunakan laporan keuangan.

Secara lebih rinci, akuntansi melibatkan pengidentifikasian, pengukuran, dan penafsiran data keuangan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Dalam praktiknya, akuntansi mencakup pengukuran, pengakuan, dan pencatatan transaksi keuangan, termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan modal. Proses pencatatan ini biasanya dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, standar akuntansi, dan aturan perpajakan yang berlaku.

Informasi keuangan yang dihasilkan melalui akuntansi digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengambilan keputusan manajemen, pelaporan kepada pemilik, investor, kreditor, dan pihak-pihak eksternal lainnya, pemenuhan kewajiban perpajakan, pengendalian dan pemantauan kegiatan keuangan, perencanaan keuangan, dan evaluasi kinerja.

Akuntansi juga melibatkan penggunaan alat dan metode seperti sistem pencatatan ganda (*double-entry bookkeeping*), analisis rasio keuangan, laporan keuangan, audit, dan pelaporan berbasis standar akuntansi.

Secara keseluruhan, akuntansi bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya untuk membantu pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan yang efektif dalam suatu organisasi atau perusahaan.

### **1.2.2 Peranan Akuntansi**

Akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan bisnis. Akuntansi memberikan dasar informasi keuangan yang penting bagi para pemangku kepentingan dalam mengelola, mengawasi, dan membuat keputusan yang berhubungan dengan aspek keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut adalah beberapa peranan utama akuntansi:

1. **Pencatatan Transaksi Keuangan**  
Peran paling dasar dari akuntansi adalah mencatat transaksi keuangan perusahaan secara akurat dan terperinci. Akuntansi menyediakan kerangka kerja dan metode untuk mengumpulkan dan mencatat data keuangan, termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan modal.
2. **Pelaporan Keuangan**  
Akuntansi memfasilitasi pembuatan laporan keuangan yang memberikan gambaran komprehensif terhadap performa

keuangan suatu organisasi. Melalui laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, berbagai pihak yang terkait seperti pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah memperoleh informasi penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat.

### 3. Pengambilan Keputusan

Data keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi menjadi landasan dalam mengambil keputusan di lingkungan bisnis. Para pemilik usaha, manajer, dan eksekutif perusahaan memanfaatkan informasi keuangan untuk mengevaluasi kinerja, mengenali pola-pola yang muncul, dan menjalankan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan efisiensi operasional serta profitabilitas.

### 4. Pengendalian dan Pemantauan

Akuntansi memberikan alat untuk mengendalikan dan memantau kegiatan keuangan perusahaan. Melalui proses seperti pembuatan anggaran, analisis varian, dan audit internal, akuntansi membantu mengidentifikasi penyimpangan, membatasi penyalahgunaan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

### 5. Perencanaan Keuangan

Akuntansi berperan penting dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan menyediakan informasi mengenai arus kas, pendapatan, dan pengeluaran masa depan, akuntansi membantu perusahaan merencanakan keuangan mereka, termasuk alokasi dana, investasi, dan kebijakan pembiayaan.

### 6. Evaluasi Kinerja

Akuntansi memungkinkan evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Dengan membandingkan data keuangan dari periode ke periode, perusahaan dapat mengevaluasi pertumbuhan, profitabilitas, dan efisiensi operasional mereka. Informasi ini juga berguna dalam membandingkan kinerja dengan pesaing di industri yang sama.

### 7. Kepatuhan Peraturan dan Standar

Akuntansi memiliki peran vital dalam memeriksa bahwa perusahaan mematuhi regulasi serta standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi internasional yang diakui, seperti

IFRS, turut berperan dalam menyokong konsistensi dan kejelasan dalam pelaporan keuangan secara global.

### 1.2.3 Manfaat Akuntansi

Dengan peran yang sangat strategis maka akuntansi memiliki manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan bisnis (Soemarso, 2005). Berikut adalah beberapa manfaat utama dari akuntansi:

1. Informasi Keuangan yang Akurat  
Akuntansi memiliki peran penting dalam mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan informasi keuangan secara akurat dan rinci. Data yang tercatat ini memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi keuangan, kinerja finansial, dan arus kas suatu entitas. Dengan adanya informasi yang akurat, pemilik, investor, pemberi pinjaman, serta para pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang sesuai.
2. Pengambilan Keputusan yang Tepat  
Data keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi menjadi landasan dalam membuat keputusan bisnis. Pemilik, manajer, dan eksekutif perusahaan menggunakan data keuangan untuk menganalisis kinerja, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan strategis yang efektif. Informasi akuntansi membantu dalam mengalokasikan sumber daya dengan bijak, mengevaluasi investasi, dan merencanakan pertumbuhan bisnis.
3. Evaluasi Kinerja yang efektif  
Akuntansi memungkinkan evaluasi kinerja keuangan suatu entitas. Dengan membandingkan data keuangan dari periode ke periode, perusahaan dapat mengevaluasi pertumbuhan, profitabilitas, dan efisiensi operasional mereka. Informasi ini juga berguna dalam membandingkan kinerja dengan pesaing di industri yang sama, sehingga memungkinkan perbaikan dan pengembangan yang diperlukan.
4. Pengendalian dan Pemantauan  
Akuntansi membantu dalam pengendalian dan pemantauan kegiatan keuangan perusahaan. Melalui proses seperti pembuatan anggaran, analisis varian, dan audit internal, akuntansi membantu mengidentifikasi penyimpangan, membatasi penyalahgunaan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur

yang ditetapkan. Ini membantu dalam menjaga integritas dan keamanan aset perusahaan.

5. Kepatuhan Hukum dan Perpajakan

Akuntansi memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa perusahaan patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Penggunaan informasi akuntansi yang akurat dan dapat dipercaya diperlukan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, peraturan perpajakan, serta hukum korporasi. Ini membantu perusahaan untuk menghindari denda dan potensi masalah hukum yang mungkin muncul karena pelanggaran.

6. Transparansi dan Kepercayaan Stakeholder

Akuntansi memungkinkan pihak yang berkepentingan, seperti pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah, untuk memahami dengan jelas aktivitas keuangan perusahaan. Dengan menyajikan informasi keuangan yang jelas dan dapat dipercaya, kepercayaan ditingkatkan, dan hubungan yang positif antara perusahaan dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan dapat terjalin.

7. Perencanaan Keuangan yang Tepat

Akuntansi memainkan peran penting dalam perencanaan finansial baik dalam waktu dekat maupun jauh ke depan dengan menyajikan data mengenai arus kas, pendapatan, dan pengeluaran yang akan datang. Melalui informasi yang disediakan, akuntansi memungkinkan perusahaan untuk merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik, termasuk bagaimana mengalokasikan dana, menentukan investasi, dan merumuskan kebijakan pembiayaan.

## 1.3 Prinsip Dasar Akuntansi

Akuntansi melibatkan penggunaan konsep dan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan secara umum, seperti prinsip pengakuan pendapatan dan biaya, prinsip konservatisme, dan prinsip konsistensi. Selain itu, akuntansi juga melibatkan penggunaan standar akuntansi yang ditetapkan oleh badan atau organisasi akuntansi yang berwenang, seperti Financial Accounting Standards Board (FASB) di Amerika Serikat atau International Accounting Standards Board (IASB) yang mengeluarkan International Financial Reporting Standards (IFRS) (Baridwan, 2000).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, akuntansi berperan dalam menciptakan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Laporan keuangan ini memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan, kinerja finansial, serta aliran uang dari suatu organisasi, yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam menganalisis, memantau, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan tersebut (Sofyan Syafri Harahap, 2011).

Prinsip-prinsip dasar akuntansi adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas (Warren, Reeve and Fees, 2005). Berikut adalah beberapa prinsip dasar akuntansi yang umumnya diterapkan yaitu:

- a. Prinsip Keterbukaan (Transparency Principle): Informasi keuangan harus disajikan secara jelas, akurat, dan terperinci agar pengguna informasi dapat memahami kondisi keuangan suatu entitas.
- b. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle): Sebuah entitas perlu tetap menggunakan metode akuntansi yang konsisten sepanjang waktu guna memastikan keseragaman dalam pelaporan keuangan.
- c. Prinsip Kewajaran (Fairness Principle): Informasi keuangan harus disajikan secara adil dan objektif, tanpa memihak pada pihak tertentu.
- d. Prinsip Konservatisme (Conservatism Principle): Entitas harus memilih metode akuntansi yang paling konservatif dalam mengukur aset dan kewajiban, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan.
- e. Prinsip Materialitas (Materiality Principle): Informasi keuangan harus disajikan secara detail dan signifikan, sehingga pengguna informasi dapat memahami dampaknya terhadap keputusan bisnis.
- f. Prinsip Kesenambungan (Continuity Principle): Entitas diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga informasi keuangan harus disajikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kesinambungan operasi.
- g. Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle): Aset dan kewajiban harus dicatat berdasarkan biaya historis, yaitu biaya

- yang dikeluarkan saat aset tersebut diperoleh atau kewajiban tersebut timbul.
- h. Prinsip Realisasi (Realization Principle): Pendapatan harus dicatat saat terjadi realisasi, yaitu saat barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan pembayaran telah diterima.
  - i. Prinsip Kepentingan Umum (Public Interest Principle): Informasi keuangan harus disajikan dengan mempertimbangkan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Prinsip-prinsip dasar akuntansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dapat dipercaya dan berguna bagi pengguna informasi (Warren, Reeve and Fees, 2005). Memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi sangat penting dalam bisnis karena:

- a. Memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan berguna bagi pengguna informasi.
- b. Membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dengan menyediakan informasi yang akurat dan terperinci tentang kondisi keuangan suatu entitas.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, dengan memastikan bahwa aset dan kewajiban dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis, dengan memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara jelas dan objektif.
- e. Membantu dalam memenuhi persyaratan perpajakan dan peraturan lainnya yang berlaku, dengan memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- f. Dengan memperoleh pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi, bisnis dapat menjamin bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pengguna informasi. Ini juga memungkinkan bisnis untuk memenuhi persyaratan perpajakan dan regulasi yang berlaku, yang pada

gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam mengelola keuangan.

## 1.4. Bidang-Bidang Akuntansi

Akuntansi mencakup beberapa bidang yang berbeda, di mana para profesional akuntansi dapat mengkhususkan diri dan bekerja. Berikut adalah beberapa bidang utama dalam akuntansi (Soemarso, 2005):

1. Akuntansi Keuangan: Bidang ini fokus pada penyusunan, analisis, dan pelaporan informasi keuangan suatu entitas. Akuntansi keuangan melibatkan pembuatan laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan dalam modal perusahaan.
2. Akuntansi Manajemen: Manajemen akuntansi merupakan kaitan antara pemanfaatan data keuangan guna pengambilan keputusan di dalam suatu entitas organisasi. Ini melibatkan analisis biaya, perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan pengendalian keuangan yang membantu manajer dalam mengelola bisnis secara efektif.
3. Akuntansi Perpajakan: Bidang ini berfokus pada pemahaman dan penerapan hukum perpajakan untuk mengelola kewajiban perpajakan suatu entitas. Profesional akuntansi perpajakan membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, memanfaatkan insentif perpajakan, dan merencanakan strategi perpajakan yang efisien.
4. Audit: Audit adalah bidang akuntansi yang melibatkan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan suatu entitas untuk memastikan keandalan, kelayakan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Auditor eksternal melakukan audit independen untuk memberikan opini tentang kebenaran dan keandalan laporan keuangan.
5. Akuntansi Forensik: Bidang akuntansi forensik melibatkan analisis dan investigasi dalam kasus-kasus penipuan, kecurangan, atau tindakan ilegal dalam konteks keuangan. Profesional akuntansi forensik memberikan layanan seperti investigasi keuangan, pendeteksian penipuan, dan ahli saksi dalam proses hukum.

6. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi sektor publik berkaitan dengan praktik akuntansi dalam lingkungan sektor publik, seperti pemerintahan, lembaga non-profit, dan organisasi publik lainnya. Ini melibatkan penyusunan laporan keuangan pemerintah, pengelolaan anggaran publik, dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi sektor publik.
7. Akuntansi Keuangan Internasional: Bidang ini berkaitan dengan penerapan dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Internasional (IFRS) dalam konteks bisnis yang beroperasi secara internasional. Profesional akuntansi keuangan internasional berfokus pada kepatuhan terhadap IFRS, harmonisasi laporan keuangan, dan analisis dampak perubahan standar internasional.
8. Akuntansi Lingkungan dan Sosial: Akuntansi lingkungan dan sosial melibatkan pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan dan sosial suatu entitas. Ini melibatkan pengukuran emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, dan aspek lain yang berkaitan dengan keberlanjutan.

Bidang dan profesi di atas hanya beberapa bidang dalam akuntansi, dan terdapat juga bidang-bidang lain yang berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan bisnis dan lingkungan. Para profesional akuntansi dapat memilih untuk mengkhususkan diri pada salah satu bidang ini atau menggabungkan pengetahuan dari beberapa bidang yang berbeda.pengelolaan keuangan.

## 1.5 Proses Akuntansi

Proses akuntansi mencakup serangkaian langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas. Berikut adalah tahapan umum dalam proses akuntansi (Munawir, 2005):

1. Identifikasi dan Pengukuran Transaksi: Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan mengukur transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas. Transaksi bisa berupa pembelian, penjualan, pembayaran, atau penerimaan uang. Setiap transaksi perlu diukur dalam satuan moneter.
2. Pencatatan Transaksi: Transaksi kemudian dicatat dalam jurnal umum. Pencatatan mencakup mencatat tanggal, deskripsi transaksi,

akun yang terkait, dan nilai transaksi. Pendekatan yang umum digunakan adalah metode pencatatan ganda, di mana setiap transaksi dicatat sebagai debit (penambahan) pada satu akun dan kredit (pengurangan) pada akun lain yang terkait.

3. Pembukuan: Setelah pencatatan transaksi, langkah selanjutnya adalah membukukan transaksi ke dalam buku besar. Buku besar adalah daftar akun yang memuat saldo setiap akun secara terperinci. Transaksi yang tercatat dalam jurnal umum dikaitkan dengan akun yang relevan dalam buku besar.
4. Penyesuaian: Pada akhir periode akuntansi (biasanya setahun), penyesuaian dilakukan untuk mencatat pendapatan dan biaya yang belum tercatat, serta menyesuaikan nilai aset dan kewajiban yang perlu diperhitungkan. Penyesuaian juga termasuk estimasi atau alokasi biaya yang berkaitan dengan periode berjalan.
5. Penutupan: Setelah penyesuaian, langkah penutupan dilakukan untuk menutup sementara akun-akun pendapatan dan biaya, serta memindahkan saldo ke akun laba ditahan atau rugi laba. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan akun-akun tersebut untuk periode berikutnya.
6. Penyusunan Laporan Keuangan: Setelah proses yang telah dijelaskan sebelumnya, dokumen laporan keuangan dibuat. Dokumen ini mencakup neraca keuangan, laporan tentang pendapatan dan kerugian, arus kas, serta perubahan ekuitas. Materi ini memberikan informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja, dan aliran uang dari suatu perusahaan.
7. Analisis dan Interpretasi: Setelah laporan keuangan disusun, data keuangan dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja dan kondisi keuangan entitas. Analisis ini membantu pengambil keputusan dalam memahami tren, perbandingan, dan rasio keuangan yang relevan.
8. Pelaporan dan Pengungkapan: Akhirnya, laporan keuangan disampaikan kepada pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan keuangan harus disusun dengan standar akuntansi yang berlaku dan disertai dengan catatan kaki dan pengungkapan tambahan yang relevan.

Proses akuntansi tersebut merupakan siklus yang berkelanjutan dan diulang setiap periode akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan berguna bagi pengambil keputusan.

## 1.6 Keterbatasan Akuntansi

Meskipun akuntansi memberikan banyak manfaat dan menjadi alat penting dalam pengelolaan informasi keuangan, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipahami (Soemarso, 2005). Berikut adalah beberapa keterbatasan akuntansi :

1. **Subyektivitas:** Proses pengukuran dan estimasi dalam akuntansi sering melibatkan penilaian dan pertimbangan subjektif. Misalnya, dalam menentukan nilai estimasi aset atau kewajiban yang tidak pasti, manajemen dapat mempengaruhi presentasi keuangan sesuai dengan kepentingan mereka.
2. **Tidak Mencerminkan Nilai Pasar Aktual:** Akuntansi menggunakan prinsip historis, yang berarti bahwa aset dan kewajiban dicatat berdasarkan biaya historis dan tidak mencerminkan nilai pasarnya saat ini. Ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam mencerminkan nilai sebenarnya dari entitas.
3. **Pengukuran Tidak Selalu Menggambarkan Kualitas yang Sebenarnya:** Pengukuran dalam akuntansi sering kali didasarkan pada estimasi dan asumsi tertentu. Meskipun dilakukan dengan hati-hati, ini masih memiliki tingkat ketidakpastian dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas sebenarnya dari aset, kewajiban, atau kinerja keuangan.
4. **Tidak Memasukkan Nilai Tidak Terukur:** Banyak aspek bisnis yang sulit diukur secara finansial tidak dapat tercermin dalam laporan keuangan. Misalnya, nilai merek, pengetahuan karyawan, dan hubungan pelanggan tidak dapat diukur dengan mudah dalam istilah keuangan, tetapi tetap memiliki nilai signifikan bagi entitas.
5. **Terfokus pada Aspek Keuangan:** Akuntansi tradisional terutama berfokus pada aspek keuangan perusahaan, seperti pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban. Ini dapat mengabaikan faktor-faktor non-keuangan, seperti kinerja operasional, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial yang relevan bagi entitas.
6. **Tidak Memperhitungkan Perubahan Nilai Pasar:** Akuntansi menggunakan metode biaya historis dan tidak memperhitungkan fluktuasi nilai pasar yang mungkin mempengaruhi nilai riil aset dan kewajiban. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam mencerminkan nilai aktual entitas dalam situasi tertentu.
7. **Terbatas pada Data Keuangan Internal:** Akuntansi terutama mengandalkan data keuangan internal yang dikumpulkan dari

transaksi bisnis. Ini dapat membatasi pemahaman yang lengkap tentang situasi dan kondisi yang mempengaruhi entitas, seperti faktor pasar, persaingan, atau perkembangan industri.

Dalam menginterpretasikan informasi keuangan, penting untuk menyadari keterbatasan ini dan menggunakan pendekatan yang holistik dengan melibatkan data dan informasi lainnya untuk pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.



## **Bab 2**

# **Prinsip Akuntansi dan Standar Akuntansi**

### **2.1 Pendahuluan**

Pada bab ini akan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip akuntansi serta standar akuntansi yang dipraktikkan dalam dunia akuntansi saat ini. Prinsip-prinsip akuntansi menjadi fondasi penting dalam menyusun laporan keuangan yang tidak hanya relevan namun juga dapat dipercaya serta dapat dibandingkan. Di sisi lain, standar akuntansi membantu dalam penafsiran serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi tersebut. Isi dalam bab ini akan membahas definisi, tujuan, dan prinsip-prinsip akuntansi yang umum diterima, serta memberikan gambaran mengenai beberapa standar akuntansi yang umum digunakan. Implikasi dan manfaat dari penerapan prinsip akuntansi dan standar akuntansi juga akan dibahas.

### **2.2 Prinsip Akuntansi**

#### **2.2.1 Definisi dan Konsep Dasar**

Prinsip akuntansi merujuk pada seperangkat aturan dan panduan yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan dalam laporan keuangan sebuah entitas. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar dan kerangka kerja bagi praktik akuntansi yang konsisten dan dapat dipahami oleh pengguna informasi keuangan (Foundation, 2021).

Beberapa konsep dasar yang mendasari prinsip akuntansi adalah sebagai berikut:

1. **Relevansi**  
Informasi keuangan harus relevan untuk pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Informasi yang relevan harus berguna, tepat waktu, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemahaman atau tindakan pengguna.
2. **Keandalan**  
Informasi keuangan harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Informasi yang diandalkan berarti bahwa informasi tersebut harus akurat, lengkap, dan bebas dari bias yang signifikan. Keandalan informasi juga diperoleh melalui penerapan prinsip-prinsip seperti kewajaran, prinsip konsistensi dan prinsip materiatitas
3. **Kebijaksanaan**  
Prinsip akuntansi mengharuskan penggunaan kebijaksanaan dalam menentukan metode akuntansi yang paling sesuai dalam situasi. Kebijakan ini mencakup pilihan yang dilakukan dalam mengukur, mengakui, dan melaporkan elemen-elemen laporan keuangan.
4. **Kesesuaian Biaya dan Pendapatan**  
Prinsip ini menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset harus sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari aset tersebut. Pendapatan, disisi lain, harus diakui hanya jika ada peningkatan manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diandalkan.
5. **Konsistensi**  
Prinsip konsistensi menuntut agar metode akuntansi yang digunakan dalam suatu entitas harus konsisten dari periode ke periode. Konsistensi ini memastikan bahwa informasi keuangan dapat dibandingkan dari suatu periode ke periode berikutnya.

### **2.2.2 Tujuan Prinsip Akuntansi**

Maksud dari akuntansi adalah untuk menyalurkan data keuangan yang relevan, dapat dipercaya, serta bermanfaat bagi pihak yang menggunakan, baik dari internal maupun eksternal, dalam mengambil keputusan finansial. Data keuangan ini berperan dalam membantu pengguna untuk menilai bagaimana kinerja finansial suatu organisasi,

mengukur serta meramalkan aliran kas yang akan datang, dan memahami aset serta kewajiban perusahaan (Foundation, 2018). Tujuan prinsip akuntansi sebagai berikut:

1. Memberikan informasi relevan  
Satu dari tujuan pokok prinsip akuntansi adalah menyampaikan data keuangan yang penting bagi pihak di dalam dan luar organisasi. Data tersebut diharapkan memberikan manfaat dalam proses pengambilan keputusan finansial yang akurat, apakah untuk para investor, pemberi pinjaman, tim manajemen, atau pihak-pihak lain yang terlibat dengan entitas terkait.
2. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan  
Prinsip akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan. Informasi keuangan harus akurat, lengkap, dan bebas dari bias yang signifikan. Hal ini membantu pengguna dalam mengandalkan informasi tersebut untuk mengevaluasi kinerja keuangan, mengukur risiko, dan membuat keputusan yang berdampak pada entitas.
3. Memfasilitasi perbandingan  
Prinsip akuntansi memastikan bahwa informasi keuangan dapat dibandingkan dari satu entitas ke entitas lainnya, serta dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara entitas yang sejenis, sehingga pengguna informasi dapat melihat tren dan pola yang muncul dari waktu ke waktu.
4. Membantu pengambilan keputusan  
Prinsip akuntansi bertujuan untuk menyalurkan data yang memiliki makna dan dapat dipercaya agar individu yang membutuhkan informasi dapat membuat keputusan yang lebih baik. Individu seperti investor atau pemberi pinjaman menggantungkan diri pada informasi tersebut guna menilai apakah investasi atau kebijakan pinjaman yang diambil cocok atau tidak. Di samping itu, manajemen juga memanfaatkan informasi keuangan untuk mengatur aktivitas serta membuat keputusan terkait dengan strategi entitas yang mereka pimpin.
5. Memenuhi persyaratan hukum dan regulasi  
Prinsip akuntansi juga bertujuan untuk memastikan bahwa entitas memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Prinsip-prinsip ini membantu entitas untuk mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan oleh badan regulasi, seperti FASB (Financial Accounting Standards Board) atau IFRS (International Financial Reporting Standards).

Memahami dan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi sangat penting agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada mereka yang memerlukan untuk membuat keputusan yang baik (Weygandt, Kimmel and Kieso, 2018).

### **2.2.3 Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Umum Diterima**

Berikut adalah beberapa prinsip akuntansi yang umum diterima dunia akuntansi yaitu:

1. Prinsip Kebijakan (Prudence)  
Prinsip ini mengharuskan entitas untuk berhati-hati dalam mengantisipasi kerugian potensial, tetapi tidak boleh mengantisipasi keuntungan potensial. Dalam situasi yang sama-sama mungkin, lebih baik mengadopsi pendekatan yang paling konservatif untuk menghindari penyajian informasi yang terlalu optimis.
2. Prinsip konsistensi  
Prinsip ini menekankan perlunya entitas untuk menggunakan metode akuntansi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali ada alasan yang jelas untuk mengubahnya. Dengan keteraturan ini, informasi keuangan bisa dibandingkan dengan konsisten dari satu periode ke periode berikutnya.
3. Prinsip Kesesuaian Biaya dan Pendapatan (Matching)  
Prinsip ini menyiratkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset harus dicatat sebagai pengeluaran pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut. Dengan demikian, hubungan biaya dan pendapatan yang terkait harus dikenali dalam laporan keuangan pada saat yang sesuai.
4. Prinsip Kepentingan Relatif (Materiality)  
Prinsip ini menyatakan bahwa informasi harus disajikan jika kehilangan atau kelalaian informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna informasi. Dalam menentukan

materialitas, perhatian harus diberikan pada ukuran, sifat, dan dampak potensial suatu item terhadap evaluasi ekonomi.

5. Prinsip Kewajaran (Fairness)  
Prinsip ini menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan secara jujur, obyektif, dan netral. Laporan keuangan harus mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan entitas tanpa bias yang signifikan.
6. Prinsip Konservatisme  
Prinsip ini mengarahkan entitas untuk mengevaluasi aset dan pendapatan dengan hati-hati, sementara mengevaluasi kewajiban dan kerugian dengan kehati-hatian yang lebih besar. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyajian informasi keuangan yang terlalu optimis.
7. Prinsip Keterbukaan Penuh (*Full Disclosure*)  
Prinsip ini meminta bahwa entitas harus menampilkan segala informasi yang penting dalam laporan keuangan beserta catatan tambahan. Tujuan dari prinsip ini adalah memberikan pengguna informasi dengan informasi yang lengkap dan transparan untuk membuat keputusan yang informasi (IASB, 2021).

## 2.3 Standar Akuntansi

### 2.3.1 Definisi dan Peran Standar Akuntansi

Standar akuntansi adalah pedoman yang dibuat untuk mengawasi cara akuntansi dilakukan serta pelaporan keuangan entitas. Fungsinya adalah menciptakan kerangka kerja yang konsisten guna menghasilkan laporan keuangan yang tepat, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan.

Standar Akuntansi memegang peranan penting dalam menjamin bahwa informasi keuangan yang dipaparkan dalam laporan keuangan menjadi transparan, dapat dipercaya, serta relevan. Standar ini membantu memastikan bahwa entitas mengungkapkan informasi yang cukup dan relevan tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan perubahan ekuitas mereka kepada para pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, karyawan, pemasok, dan pihak terkait lainnya.

Peran utama Standar Akuntansi adalah sebagai berikut:

1. **Konsistensi**  
Standar Akuntansi memberikan kerangka kerja yang konsisten dalam mengukur, mengungkapkan, dan melaporkan informasi keuangan. Dengan adanya standar ini, perusahaan dapat membandingkan laporan keuangan mereka dari tahun ke tahun dan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
2. **Transparansi**  
Pedoman Akuntansi berperan dalam menciptakan keterbukaan dalam mengungkapkan data keuangan, memungkinkan para pihak yang berkepentingan untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang kondisi keuangan, kinerja, serta aliran kas suatu perusahaan.
3. **Pembandingan**  
Standar Akuntansi memungkinkan perbandingan yang adil antara entitas yang berbeda. Dalam hal ini, laporan keuangan dari berbagai entitas dapat dibandingkan secara objektif, sehingga investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat keputusan yang lebih baik.
4. **Perlindungan Investor**  
Standar Akuntansi bertujuan untuk menjamin perlindungan kepada para investor dengan memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan. Dengan penerapan standar ini, investor dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kinerja serta potensi keuangan dari perusahaan tempat mereka berinvestasi.
5. **Penilaian Risiko**  
Standar Akuntansi membantu pemangku kepentingan dalam menilai risiko bisnis dan keuangan suatu entitas. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dapat memberikan wawasan tentang stabilitas keuangan perusahaan, potensi risiko, dan potensi keuntungan.
6. **Regulasi dan Kepatuhan**  
Standar Akuntansi juga berperan dalam pengaturan dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Entitas harus mematuhi standar akuntansi yang relevan yang ditetapkan oleh badan pengatur dan otoritas keuangan setempat.

Dalam keseluruhan, standar akuntansi berfungsi untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, konsisten, dan transparan dalam penyajian informasi keuangan suatu entitas, sehingga memfasilitasi pengambilan

keputusan yang informasional dan memungkinkan perbandingan antar industri.

### **2.3.2 Penerapan Standar Akuntansi**

Penerapan Standar Akuntansi melibatkan serangkaian langkah dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan persyaratan yang ditetapkan dalam standar tersebut. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam penerapan standar akuntansi:

1. **Pemahaman Standar**  
Pahami dengan baik standar akuntansi yang berlaku dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pelajari definisi, persyaratan, dan pedoman yang terkait dengan topik akuntansi yang sedang diterapkan.
2. **Identifikasi Transaksi dan Kejadian**  
Identifikasi transaksi dan kejadian yang relevan yang harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Pastikan bahwa semua transaksi dan kejadian yang signifikan telah diidentifikasi dan dipahami dengan baik.
3. **Pengukuran dan Penilaian**  
Gunakan metode pengukuran yang sesuai dengan standar akuntansi untuk menentukan nilai dan jumlah yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Misalnya, standar akuntansi mungkin mengatur penggunaan harga perolehan, nilai wajar, atau metode lainnya untuk mengukur aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. **Pengungkapan Informasi**  
Pastikan bahwa semua informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi telah diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan. Ini meliputi catatan atas kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi yang signifikan, risiko dan ketidakpastian, serta informasi lain yang relevan.
5. **Penyusunan Laporan Keuangan**  
Susun laporan keuangan berdasarkan format dan struktur yang ditentukan oleh standar akuntansi. Laporan keuangan umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
6. **Audit dan Verifikasi**

Lakukan audit dan verifikasi atas laporan keuangan oleh pihak yang independen, seperti akuntan publik. Tujuan audit adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan memberikan gambaran yang adil tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

7. Pemantauan dan Perubahan

Terus pantau perkembangan dan perubahan dalam standar akuntansi. Jika ada revisi atau perubahan, pastikan untuk mengikuti dan menerapkannya dalam laporan keuangan di masa mendatang.

Penerapan standar akuntansi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan persyaratan yang berlaku, serta kepatuhan yang konsisten dalam menyusun, mengukur, dan mengungkapkan informasi keuangan dalam laporan keuangan.

### **2.3.3 Standar Akuntansi Akuntansi yang Umum Digunakan**

Beberapa standar akuntansi yang umum digunakan di seluruh dunia adalah:

1. International Financial Reporting Standards (IFRS)  
IFRS diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) dan merupakan standar akuntansi yang diadopsi secara luas di lebih dari 140 negara. IFRS memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk penyusunan laporan keuangan, termasuk prinsip pengukuran, pengungkapan, dan presentasi informasi keuangan.
2. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)  
GAAP adalah standar akuntansi yang diterima dan digunakan secara umum di Amerika Serikat. GAAP disusun oleh Financial Accounting Standards Board (FASB) dan Securities and Exchange Commission (SEC) untuk memandu penyusunan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa saham AS.
3. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)  
IPSAS diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) dan digunakan untuk entitas sektor publik, termasuk pemerintah, badan usaha milik negara, dan organisasi nirlaba sektor publik di seluruh dunia. IPSAS memberikan panduan tentang penyusunan laporan keuangan sektor publik yang transparan dan akuntabel.
4. Generally Accepted Accounting Practice (GAAP) – Inggris  
GAAP Inggris adalah standar akuntansi yang digunakan di Inggris dan diterbitkan oleh Financial Reporting Council (FRC). Standar ini

mencakup Financial Reporting Standards (FRS) dan Accounting Standards (AS) yang berlaku untuk perusahaan yang terdaftar di Inggris.

5. Chinese Accounting Standards (CAS)  
CAS adalah standar akuntansi yang digunakan di Republik Rakyat Tiongkok. CAS diterbitkan oleh Ministry of Finance (MOF) dan mencakup berbagai prinsip pengukuran, pengungkapan, dan presentasi informasi keuangan untuk perusahaan di Tiongkok.
6. Japanese Generally Accepted Accounting Principles (JGAAP)  
JGAAP adalah standar akuntansi yang digunakan di Jepang. JGAAP mencakup Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE) yang diterbitkan oleh Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) untuk perusahaan komersial, dan Accounting Standards for Non-Profit Organizations (ASNPO) yang diterbitkan oleh Japanese NPO Accounting Standards Foundation untuk organisasi nirlaba.

Selain itu, ada beberapa standar yang umum digunakan di Indonesia yaitu:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)  
SAK merupakan seperangkat ketentuan akuntansi yang diterapkan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Standar ini disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan menjadi landasan yang mengatur cara pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian informasi keuangan. SAK di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang sejalan dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB). Namun, SAK juga mempertimbangkan kondisi dan regulasi yang berlaku di Indonesia (Spiceland, Spiceland and Njoroge, 2018).

Beberapa SAK yang umum digunakan di Indonesia antara lain:

- a. SAK Etika Profesi Akuntan Publik (SAK ETAP)  
Merupakan standar akuntansi yang diterapkan oleh akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan audit, review, dan jasa lainnya yang terkait dengan pengungkapan informasi keuangan.
- b. SAK Umum (SAK-ETAP Umum)  
Merupakan standar akuntansi yang berlaku untuk entitas non-publik atau entitas dengan tingkat kompleksitas dan ukuran yang lebih rendah.

- c. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP Entitas TAP)  
Merupakan standar akuntansi yang berlaku untuk entitas yang tidak terdaftar di bursa efek atau tidak mempunyai obligasi yang diperdagangkan di pasar modal.
- d. SAK Penyajian Laporan Keuangan (SAK-PLK)  
Merupakan standar akuntansi yang mengatur tata cara penyajian laporan keuangan, termasuk format dan pengungkapan yang harus ada dalam laporan keuangan.
- e. SAK Pajak (SAK-Pajak)  
Merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi terkait dengan pajak, termasuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan pajak.

Penerapan SAK penting untuk menciptakan transparansi, konsistensi, dan keandalan informasi keuangan di Indonesia. Entitas bisnis diwajibkan untuk mengikuti SAK yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan mereka agar dapat memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

## 2. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS)

IFRS, yang merupakan serangkaian standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB), telah diterapkan secara meluas di lebih dari 140 negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tujuan utama IFRS adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang konsisten dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, andal, dan dapat dibandingkan antar entitas bisnis di berbagai negara. Dengan adopsi IFRS, diharapkan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan global dapat ditingkatkan, sehingga memudahkan perbandingan dan evaluasi kinerja perusahaan.

IFRS mencakup berbagai topik yang mencakup pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan presentasi informasi keuangan dalam laporan keuangan. Beberapa standar IFRS yang penting antara lain:

- a. IFRS 9 - Instrumen Keuangan: Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif.

- b. IFRS 15 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan: Standar ini memberikan pedoman tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.
- c. IFRS 16 - Sewa: Standar ini mengatur perlakuan akuntansi untuk kontrak sewa, baik dari sisi penyewa maupun pemberi sewa.
- d. IFRS 17 - Kontrak Asuransi: Standar ini memberikan kerangka kerja untuk akuntansi kontrak asuransi dan mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang terkait.
- e. IFRS 16 - Nilai Wajar: Standar ini memberikan pedoman tentang pengukuran dan pengungkapan nilai wajar aset dan kewajiban dalam laporan keuangan.

Selain itu, terdapat standar IFRS lainnya yang mencakup topik seperti inventaris, imbalan kerja, konsolidasi, instrumen keuangan kompleks, dan banyak lagi. Adopsi IFRS oleh suatu negara atau entitas bisnis umumnya didasarkan pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Adopsi IFRS dapat dilakukan secara penuh atau dalam bentuk konvergensi dengan standar akuntansi nasional yang berlaku.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian standar akuntansi yang digunakan untuk entitas sektor publik, seperti pemerintah, lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, dan organisasi nirlaba sektor publik. SAP dirancang khusus untuk mengatur penyusunan laporan keuangan entitas sektor publik dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang efektif.

Di Indonesia, SAP diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Pemerintah. SAP mengadopsi prinsip-prinsip yang sejalan dengan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). Beberapa SAP yang umum digunakan di Indonesia antara lain:

- a. SAP Entitas Pemerintah (SAP EP): SAP EP mengatur prinsip akuntansi dan prosedur pelaporan keuangan untuk entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara.
- b. SAP Organisasi Nirlaba (SAP ON): SAP ON digunakan untuk entitas nirlaba sektor publik, seperti yayasan, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah.

SAP mengatur berbagai aspek akuntansi sektor publik, termasuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan presentasi informasi keuangan. SAP juga mencakup topik seperti pengelolaan aset, pengelolaan liabilitas, pengelolaan dana, anggaran, dan pelaporan kinerja.

Penerapan SAP penting untuk memastikan integritas dan akurasi laporan keuangan entitas sektor publik, serta untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. SAP membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan organisasi sektor publik, serta memfasilitasi perbandingan dan evaluasi kinerja antar entitas sektor publik.

#### 4. Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAETAP)

SAETAP merupakan seperangkat ketentuan akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) bagi perusahaan yang tidak diwajibkan menyusun serta menampilkan laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS).

SAETAP ditujukan untuk entitas bisnis dengan tingkat kompleksitas dan ukuran yang lebih rendah, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuan SAETAP adalah memberikan panduan akuntansi yang sederhana dan relevan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAETAP mencakup prinsip-prinsip dasar akuntansi, pedoman pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan informasi keuangan. Standar ini juga mencakup topik-topik seperti pengakuan pendapatan, perlakuan aset tetap, pengukuran inventaris, pengelolaan utang, dan lainnya.

Penerapan SAETAP membantu entitas bisnis tanpa akuntabilitas publik untuk menyusun laporan keuangan yang memadai, meskipun dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan entitas yang tunduk pada SAK atau IFRS. SAETAP memungkinkan entitas tersebut untuk memenuhi persyaratan pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia, memberikan informasi yang relevan dan dapat dipahami kepada pihak yang berkepentingan.

Penting untuk dicatat bahwa SAETAP terus mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan akuntansi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi entitas bisnis tanpa akuntabilitas publik untuk mengikuti perubahan dan penyempurnaan SAETAP yang terbaru.

## **2.4 Implementasi Prinsip Akuntansi dan Standar Akuntansi**

### **2.4.1 Proses Pelaporan Keuangan**

Proses pelaporan keuangan melibatkan penerapan prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan secara konsisten dan dapat diandalkan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam implementasi prinsip akuntansi dan standar akuntansi dalam proses pelaporan keuangan:

1. **Identifikasi dan penerapan Standar Akuntansi:** Langkah pertama adalah mengidentifikasi standar akuntansi yang relevan yang harus diterapkan. Standar akuntansi seperti International Financial Reporting Standards (IFRS) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di negara tertentu memberikan kerangka kerja dan panduan tentang bagaimana menyusun laporan keuangan. Entitas harus memahami standar akuntansi yang berlaku dan menerapkannya dengan benar.
2. **Pengumpulan Data Keuangan:** Data keuangan harus dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, bukti pendukung, catatan akuntansi, dan sistem informasi keuangan. Data ini meliputi informasi tentang aset, kewajiban, pendapatan, biaya, dan arus kas.

3. Pengolahan Data: Data keuangan yang dikumpulkan harus diolah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipahami. Proses pengolahan data meliputi pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyesuaian untuk mencerminkan kondisi keuangan entitas dengan benar.
4. Pengakuan dan Pengukuran: Prinsip akuntansi digunakan untuk mengakui dan mengukur elemen-elemen laporan keuangan seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Prinsip-prinsip seperti prinsip kewajaran, kesesuaian biaya dan pendapatan, serta konservatisme digunakan dalam proses ini.
5. Pada tahap setelah proses pengakuan dan pengukuran, informasi keuangan harus disusun dengan tata cara yang terstruktur dan mudah dipahami dalam dokumen laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta catatan tambahan yang mendetail. Cara penyajian dan pengungkapan ini harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku.
6. Verifikasi dan Audit: Laporan keuangan harus diperiksa dan diverifikasi oleh pihak yang kompeten, seperti auditor independen. Proses audit melibatkan penilaian atas kepatuhan terhadap prinsip akuntansi, pengujian pengendalian internal, dan penilaian atas keandalan informasi keuangan yang disajikan.
7. Interpretasi dan Analisis: Setelah laporan keuangan disusun, informasi keuangan harus diinterpretasikan dan dianalisis untuk memahami kinerja keuangan entitas, tren, dan potensi risiko. Interpretasi dan analisis ini membantu pengguna informasi dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat.

#### **2.4.2 Interpretasi Prinsip Akuntansi dan Standar Akuntansi**

Interpretasi prinsip akuntansi dan standar akuntansi melibatkan pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap aturan dan pedoman yang dijelaskan dalam standar akuntansi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses interpretasi prinsip akuntansi dan standar akuntansi:

1. Penafsiran atas prinsip-prinsip akuntansi serta standar akuntansi sebaiknya merujuk pada ketentuan akuntansi yang berlaku di suatu wilayah atau negara tertentu. Standar akuntansi seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) atau

*Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana entitas harus mengukur, mengakui, dan melaporkan informasi keuangan.

2. Memahami tujuan dan prinsip-prinsip dasar: Prinsip akuntansi dan standar akuntansi didasarkan pada tujuan tertentu, seperti memberikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan bermanfaat bagi pengguna eksternal dan internal. Penting untuk memahami tujuan dan prinsip-prinsip dasar ini untuk menginterpretasikan standar akuntansi dengan benar.
3. Menggunakan penafsiran yang adil dan obyektif: Interpretasi prinsip akuntansi dan standar akuntansi harus dilakukan dengan adil dan obyektif. Hal ini melibatkan penilaian yang tidak memihak terhadap situasi dan transaksi yang dihadapi oleh entitas. Interpretasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan tidak memihak, tanpa adanya bias yang signifikan.
4. Mempertimbangkan konteks dan fakta-fakta yang relevan: Dalam menginterpretasikan prinsip akuntansi dan standar akuntansi, penting untuk mempertimbangkan konteks yang relevan dan fakta-fakta yang ada. Setiap situasi atau transaksi dapat memiliki faktor-faktor unik yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan standar akuntansi. Konteks bisnis, kebijakan perusahaan, dan persyaratan hukum juga dapat mempengaruhi interpretasi prinsip akuntansi.
5. Mengikuti pedoman interpretasi: Dalam beberapa kasus, organisasi standar akuntansi atau badan regulasi akan mengeluarkan pedoman interpretasi untuk membantu entitas dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi yang kompleks. Pedoman interpretasi ini memberikan panduan dan contoh konkret tentang bagaimana suatu prinsip atau standar harus diterapkan dalam situasi tertentu. Entitas harus mengikuti pedoman interpretasi yang diberikan oleh badan yang berwenang.

Interpretasi prinsip akuntansi dan standar akuntansi merupakan proses yang penting dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan andal. Dengan memahami dan menerapkan prinsip akuntansi dengan tepat, entitas dapat menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya kepada pengguna informasi keuangan.



## Bab 3

# Siklus Akuntansi dan Jurnal Umum

### 3.1 Pendahuluan

Akuntansi merupakan proses identifikasi/analisis, mengukur, dan melaporkan informasi dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna informasi keuangan tersebut untuk memberi evaluasi dan keputusan yang tegas juga terdefinisi secara terstruktur. Hal ini merupakan definisi dari akuntansi menurut *American Accounting Association (AAA)*. Oleh karena itu menurut *Financial Accounting Standards Board (FASB)* atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan, akuntansi dalam bentuk kegiatan jasa adalah untuk memperoleh informasi kuantitatif yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. "Akuntansi adalah aktivitas ekonomi dibidang jasa maupun dagang menjadi wujud sistem informasi (proses akuntansi) dalam memperoleh informasi kuantitatif sebagai upaya dalam menyatakan bisnis yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang tegas bagi mereka pengguna informasi tersebut" (Latuconsina, 2019).

Berdasarkan dari berbagai pengertian akuntansi tersebut disimpulkan bahwa akuntansi merupakan pengukuran hasil dari kegiatan ekonomi kemudian disampaikan dalam bentuk laporan keuangan kepada seluruh *stakeholder*.

Dalam studi pengantar akuntansi dan studi akuntansi keuangan ada dua konsep yang sering kita jumpai pada kedua studi tersebut yaitu siklus akuntansi atau disebut juga dengan istilah *Accounting Cycle* dan proses

akuntansi atau *Accounting Process*. Untuk mendapatkan penjelasan dari serangkaian kegiatan terkait dalam pengelolaan data transaksi sampai dalam wujud laporan keuangan digunakanlah kedua konsep tersebut. Namun hakikatnya belum terdapat rangkaian standar dalam menghasilkan suatu informasi keuangan meskipun kedua konsep tersebut seringkali didapatkan pada studi pengantar akuntansi dan studi akuntansi keuangan.

Pada Bab kali ini kita akan mencoba mengupas tuntas terkait dengan siklus akuntansi mulai dari pengertian siklus akuntansi, tahapan siklus akuntansi hingga ke jurnal umum. Berikut ulasan lengkapnya dibawah ini.

## 3.2 Siklus Akuntansi

Proses akuntansi yang berulang dalam pengidentifikasian, menganalisis dan merekam segala aktivitas transaksi dalam sebuah entitas dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan yang berisi informasi bagi para *stakeholder* secara khusus disebut dengan siklus akuntansi. Pada aktivitas/kegiatan akuntansi siklus akuntansi terjadi dalam satu periode dan produk yang dihasilkan yaitu laporan keuangan. Tahapan dari siklus akuntansi ada 3, yaitu:

1. Tahap Pencatatan

Proses mencatat aktivitas transaksi berupa data keuangan dan informasi yang termuat secara sistematis kemudian dicatat didalam jurnal.

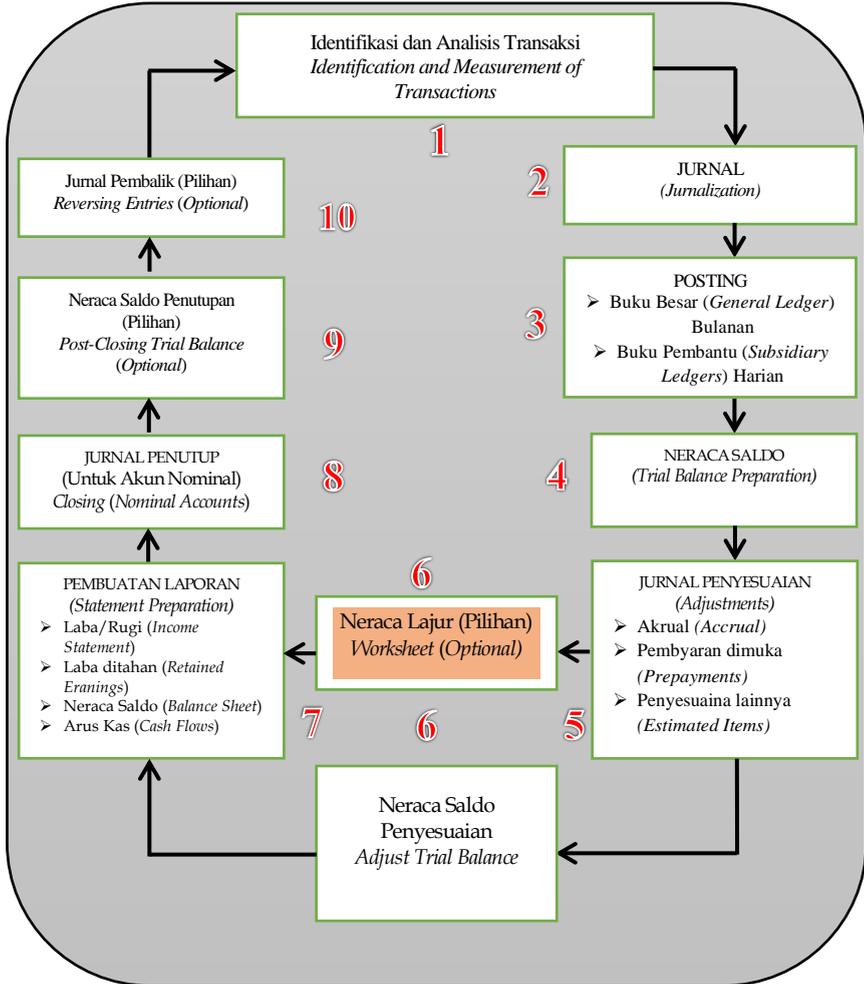
2. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dikenal dengan tahap pengelompokkan dimana akun-akun dari jurnal umum dikelompokkan dalam buku besar (*General Ledger*) kemudian dipost kembali ke neraca saldo (*Trial Balance Preparation*) dengan tampilan saldo terkini atau saldo sebenarnya setelah penyesuaian.

3. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap penyajian informasi yang termuat dalam laporan keuangan. Hal ini dapat menjadi referensi untuk para investor maupun *stakeholder* lainnya dalam menafsirkan prospek aliran kas pada periode yang akan datang.

Adapun tahapan dalam siklus akuntansi dijelaskan pada ilustrasi 4-1 sebagai berikut:



**Gambar 3. 1:** Tahapan dalam siklus akuntansi (Warfield, Kieso, 2010).

Ketika semua tahap dalam siklus telah diselesaikan dengan baik dan secara sistematis, maka siklus ini dimulai lagi dari awal periode akuntansi selanjutnya (Warfield, 2010).

### 3.2.1 Identifikasi dan Analisis Transaksi

Siklus akuntansi berawal dari adanya transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. *Financial Accounting Standards Boards* (FASB) mengadopsi kalimat "transaksi dan aktivitas transaksi lainnya dan keadaan yang berpengaruh pada perusahaan bisnis", diterapkan untuk menerangkan awal dari penyebab perbedaan aktiva, kewajiban dan ekuitas pada entitas (Warfield, 2010). Setiap transaksi atau kejadian yang dilakukan pada entitas harus didukung dengan adanya dokumen/bukti transaksi yang berupa nota, kwitansi, faktur bukti dari penerimaan dan pengeluaran uang, cek dan giro dan lain-lain. Berdasarkan sumber dari bukti transaksi, didalam suatu perusahaan bukti aktivitas transaksi ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Bukti aktivitas transaksi didalam (*intern*) perusahaan.  
Aktivitas transaksi yang terdapat didalam (*intern*) entitas yang dimana terkait dalam pembayaran gaji/upah karyawan, pembelian atau penjualan barang dan pembebanan penyusutan aset tetap.
2. Bukti transaksi eksternal perusahaan.  
Transaksi yang terjadi bukan hanya di luar perusahaan melainkan melibatkan pihak-pihak tertentu yang berada diluar perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Contohnya: membeli bahan baku untuk keperluan produksi perusahaan. Untuk transaksi pembelian produk yang sangat besar atau terkait dengan perusahaan yang dikelola secara benar untuk sebagian besar akan mendapatkan tanda terima pembelian (faktur) yang informatif dan sama halnya dengan transaksi yang lain seperti pengiriman uang *cash* melalui bank. Berbeda ketika pengeluaran uang yang terjadi dalam jumlah yang sedikit atau relatif kecil seperti dalam pembelian perlengkapan kantor hanya akan diberikan struk kas register dan bahkan tidak ada bukti transaksi yang sama sekali diberikan.

Setelah melewati tahap awal identifikasi dan menganalisis bukti transaksi tahap selanjutnya yaitu penjumlahan. Mencatat serangkaian aktivitas ekonomi perusahaan dalam bentuk transaksi internal maupun ekseternal disebut dengan menjurnal. Jurnal merupakan buku catatan pertama untuk data akuntansi (Warfield, 2010). Sebagaimana ditunjukkan oleh identitas kolom, jurnal menyediakan informasi menurut (Yusuf, 2005), sebagai berikut:

- a. Tanggal, sesuatu yang esensial memberikan gambaran terkait terlaksananya peristiwa ekonomi.
- b. Keterangan/perkiraan.
- c. Kolom debit, mendeskripsikan nominal debit.
- d. Kolom kredit, mendeskripsikan nominal kredit.

Untuk mempermudah penjumlahan, perusahaan sebaiknya membuat format bukti transaksi internal yang dilampiri dengan bukti transaksi eksternal. Hal ini sangat penting karena jika perusahaan hanya mengandalkan bukti transaksi dari luar perusahaan akan mempersulit dalam pengarsipan atau pencatatan bukti transaksi karena dalam segi bentuk dan isi yang tertera dalam formulir berbeda-beda tiap perusahaan.

### 3.2.2 Posting

Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi setelah identifikasi transaksi dan penjumlahan adalah tahapan atau proses memposting. Yang mana pada tahapan ini adalah pemindahan catatan kegiatan transaksi berupa *account* pada *journal* (jurnal) ke *general ledger* (buku besar) berupa akun yang sejenis. Hal ini mencerminkan siklus akuntansi yang berjalan dengan normal. Kegunaan dari buku besar adalah salah satu cara untuk mengklasifikasikan setiap aktivitas dari transaksi ekonomi dan juga persiapan untuk penyusunan sampai kepada penyajian laporan keuangan.

Saat sebuah transaksi tercatat dalam jurnal dengan satu akun di sisi debit dan akun lainnya di sisi kredit, setiap nilai uang yang terdapat di kedua akun itu akan dimasukkan ke dalam buku besar sesuai dengan akun yang bersangkutan, serta posisi debit atau kreditnya, dengan jumlah nominal yang identik. Untuk lebih mudah memahami terkait pemostingan akun dari jurnal ke buku besar dapat dijelaskan melalui contoh berikut ini:

PT. Adidaya Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *Engineering*. Perusahaan didirikan pada tahun 2020 oleh Tn. Iskandar. Berikut transaksi yang terjadi didalam PT. Adidaya Perkasa selama bulan Januari 2020:

- a. 1 Januari: Menerima uang tunai senilai Rp. 150.000.000 sebagai modal awal dari pemegang saham.
- b. 5 Januari: Tn. Iskandar menyerahkan bangunan dan tanahnya sebagai setoran modal saham senilai Rp. 250.000.000 untuk bangunan dan Rp. 200.000.000 untuk tanah.

- c. 6 Januari: Manajemen perusahaan mulai membeli peralatan kantor berupa, printer dan komputer dilakukan secara kredit senilai Rp. 17.000.000
- d. 7 Januari: PT. Adidaya Perkasa mendapat kredit usaha dari bank senilai Rp. 60.000.000
- e. 12 Januari: PT. Adidaya Perkasa mendapat pesanan perbaikan komputer senilai Rp. 9.000.000. Saat bersamaan 27 unit perbaikan komputer dari CV. Maharani senilai Rp. 20.000.000 secara kredit.
- f. 25 Januari: PT. Adidaya Perkasa membayar gaji karyawan senilai Rp. 3.500.000, beban perlengkapan senilai 2.300.000 dan beban bunga senilai Rp. 1.200.000
- g. 26 Januari: PT. Adidaya Perkasa melunasi separuh pembelian peralatan kantor yang dibeli secara kredit pertanggal 6 Januari 2020 senilai Rp. 10.000.000
- h. 28 Januari: CV. Maharani melunasi sebagian utangnya pada PT. Adidaya Perkasa atas jasa perbaikan komputer senilai Rp. 12.000.000
- i. 30 Januari: Deviden dibagikan kepada setiap pemegang saham oleh PT. Adidaya Perkasa senilai Rp. 5.000.000

Jurnal  
PT. Adidaya  
Januari 2020

Tahun 2020		Keterangan	Jumlah	
			D	K
Januari	1	Kas	150.000	
		Modal, Tn Iskandar		150.000
	5	Bangunan	250.000	
		Tanah	200.000	
		Modal saham		450.000
	6	Peralatan	17.000	
		Utang Usaha		17.000
	7	Kas	60.000	
		Bank		60.000
	12	Kas	9.000	
		Piutang	20.000	
		Pendapatan		29.000
	25	Beban Gaji	3.500	
		Beban Perlengkapan	2.300	
		Beban Bunga	1.200	
		Kas		7.000
	26	Utang usaha	10.000	
		Kas		10.000
	28	Kas	12.000	
		Piutang		12.000
	30	Deviden	5.000	
		Kas		5.000

Setelah pembuatan jurnal pada aktivitas transaksi di bulan Januari 2020, selanjutnya akun-akun tersebut diposting kedalam buku besar dengan akun dan nominal yang sama. Tampilan dari buku besar sebagai berikut:

Kas : 110 Dalam ribuan

	Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
						Debet
<b>Januari 2020</b>	2	Setoran modal		150.000		150.000
	7	Pinjaman Bank		6.000		210.000
	25	Gaji karyawan			3.500	215.500
	25	Beban perlengkapan			2.300	213.200
	25	Bunga bank			1.200	212.000
	26	Bayar Utang			10.000	202.000
	28	Penerimaan Piutang		12.000		214.000
	30	Pembagian Deviden			5.000	209.000

Piutang Usaha : 120 Dalam ribuan

Januari 2020	Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	
	12	CV. Maharani		20.000			20.000
	28	Pembayaran kredit			12.000		8.000

Peralatan : 140 Dalam ribuan

Januari 2020	Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	
	6	Pembelian peralatan		17.000			17.000

Bangunan : 150 Dalam ribuan

Januari 2020	Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	
	5	Setoran Modal Saham		250.000			250.000

Tanah : 160 Dalam ribuan

Januari 2020	Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	
	5	Setoran Modal Saham		200.000			200.000

Utang Usaha : 210 Dalam ribuan

Januari 2020	Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
	6	Membeli Peralatan			17.000		17.000
	26	Pembayaran kredit		10.000			7.000

Utang Bank : 230 Dalam ribuan

Januari 2020	Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
	7	Kredit Bank			60.000		60.000

Modal Saham : 310 Dalam ribuan

Januari 2020	Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
	1	Setoran Modal			150.000		150.000
	5	Setoran Modal			450.000		600.000

Dividen : 410 Dalam ribuan

Januari 2020	Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
	30	Pembagian dividen		5.000		5.000	

Pendapatan : 510 Dalam ribuan

Januari 2020	Tgl	Perkiraan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
						Debet	Kredit
	12	Pendapatan			9.000		9.000
	12	Pendapatan			20.000		29.000

Dari transaksi diatas tergambar tautan antara *journal* dan *general ledger* yang terlihat jelas dan sistematis.

### 3.2.3 Neraca Saldo

Setelah melalui tahap awal yaitu identifikasi dan menganalisis transaksi kemudian melakukan penjurnalan lalu memposting ke dalam buku besar, selanjutnya tahap yang akan dilakukan yaitu membuat atau menyusun neraca saldo. Pada dasarnya neraca saldo merupakan kertas kerja yang telah disusun baik itu manual atau otomatis menggunakan sistem akuntansi yang mencantumkan akun yang ada dibuku besar pada akhir periode (akhir bulan, akhir tahun dan akhir kuartal) (Wulandari, Salsabila and Utara, 2023).

Neraca saldo sering dikenal dengan sebutan *trial balance* yang berarti posisi debet kredit dalam laporan keuangan entitas haruslah selalu seimbang atau sama. Ketika hasil akhir dari neraca saldo tidak *balance*/sama berarti terjadinya kesalahan pada entry jurnal yang salah satu penyebabnya adalah kesalahan dalam perhitungan saldo akun yang ada. Salah satu tujuan dari penyusunan neraca saldo, yaitu pembuktian adanya keakuratan data antara jurnal dan buku besar. Sebagai bahan evaluasi, neraca saldo biasanya disajikan diakhir periode pelaporan keuangan.

Sebagai gambaran dari penjelasan diatas, berikut dilanjutkan penyajian contoh neraca saldo pada transaksi sebelumnya, yaitu :

PT. Adidaya Perkasa  
Neraca Saldo  
Per 30 Januari 2020

<b>Perkiraan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas	209.000	
Piutang usaha	8.000	
Peralatan	17.000	
Bangunan	250.000	
Tanah	200.000	
Modal Saham		600.000
Utang usaha		7.000
Utang Bank		60.000
Pendapatan		29.000
Beban gaji karyawan	3.500	
Beban perlengkapan	2.300	
Beban Bunga	1.200	
Deviden	5.000	
<b>Total</b>	<b>696.000</b>	<b>696.000</b>

### 3.3 Jurnal Umum

Jurnal umum adalah pencatatan teratur dan berurutan yang dimiliki oleh perusahaan mengenai transaksi yang dilakukan, disusun secara sistematis berdasarkan urutan waktu (Hermain *et al.*, 2019). Jurnal umum atau dikenal dengan catatan harian. Pada dasarnya jurnal umum merupakan catatan yang pertama dilakukan sebagai bukti dari aktivitas transaksi yang tersusun secara sistematis dalam periode waktu tertentu. Untuk perusahaan yang aktivitas usahanya relatif sedikit, dalam melakukan penjumlahan untuk mencatat aktivitas ekonomi yang dilakukan cukup menggunakan jurnal umum. Terkait hal tersebut jenis transaksi yang terjadi, seperti pengeluaran kas hingga penerimaan kas dan bank, penjualan dan pembelian yang dilakukan secara kredit tertuang atau dicatat pada jurnal umum. Jurnal umum memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Historis  
Digunakan sebagai catatan yang termuat data transaksi yang sistematis sesuai waktu terlaksananya aktivitas ekonomi.
2. Fungsi Mencatat

Digunakan sebagai media pencatatan segala aktivitas transaksi ekonomi dalam perusahaan yang tergambar secara rinci dan sempurna.

3. Fungsi Analisis

Berfungsi dalam menelaah atau mencermati setiap aktivitas ekonomi untuk penempatan *debt account* ataupun *credit account*.

4. Fungsi Instruktif

Mengarahkan untuk memposting kedalam buku besar sesuai penempatan debit dan kredit

5. Fungsi Informatif

Memberikan informasi berupa keterangan yang jelas dan apa adanya terkait aktivitas transaksi keuangan yang ada didalam perusahaan.

Terkait format kolom yang digunakan dalam jurnal umum terdapat beberapa item, yaitu : kolom tunggal, nomor bukti, keterangan, kode rekening serta debit dan kredit. Untuk kolom nomor bukti sangat mempermudah dalam pencarian dokumen dari bukti pencatatan transaksi dalam jurnal dan dalam penetapan nomornya dapat dilakukan secara berurut selama periode satu tahun atau satu bulan. Perlu diketahui dasar pemilihan



# Bab 4

## Laporan Keuangan

### 4.1 Pendahuluan

Hasil yang timbul dari sistem informasi akuntansi meliputi berbagai laporan keuangan, yang berfungsi sebagai sarana utama untuk menyampaikan semua data atau kondisi keuangan dari suatu perusahaan kepada pihak di luar perusahaan yang membutuhkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan finansial. Laporan keuangan ini menggambarkan semua aktivitas atau operasi suatu badan usaha yang diukur dalam bentuk mata uang. Laporan keuangan dari sebuah entitas terdiri dari:

1. Neraca laba rugi
2. Neraca perubahan ekuitas
3. Neraca posisi keuangan (neraca)
4. Neraca arus kas dan
5. Neraca keuangan (calk)

Laporan keuangan disiapkan setiap tahun dengan tujuan memenuhi keperluan informasi dan situasi keuangan suatu organisasi untuk berbagai pemakai laporan, termasuk internal dan eksternal. Komponen kunci dalam format laporan keuangan meliputi identitas entitas, judul laporan, periode pelaporan, mata uang yang digunakan, sistem pembulatan, dan konten laporan. Penyajian elemen-elemen tersebut sangat penting bagi pengguna agar dapat memahami informasi mengenai identitas perusahaan dan waktu pembuatan laporan keuangan tersebut.

## 4.2 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah output terakhir dari rangkaian kegiatan mencatat, mengelola, dan memeriksa transaksi perusahaan. Laporan tersebut digunakan sebagai data bagi pihak dalam dan luar perusahaan untuk membuat keputusan, menegakkan pertanggungjawaban, serta sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya (Sofyan S. Harahap, 2011).

Berdasarkan ketentuan PSAK No. 1 tahun 2022 Pasal 9, diungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan deskripsi rinci mengenai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Biasanya, laporan keuangan mencakup ringkasan pendapatan dan pengeluaran, gambaran perubahan nilai kepemilikan, ikhtisar situasi keuangan, rincian aliran uang, dan tambahan informasi yang memberikan dukungan pada data yang tercantum dalam laporan keuangan.

Secara keseluruhan, laporan keuangan mencatat informasi keuangan dari suatu organisasi dalam periode akuntansi tertentu yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja entitas tersebut. Secara prinsip, laporan keuangan adalah produk dari proses akuntansi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi seputar keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi atau jalannya bisnis perusahaan tersebut (Kusoy and Priyadi, 2020).

## 4.3 Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan data finansial yang berkaitan dengan suatu perusahaan, yang memberikan informasi berharga kepada investor yang ada dan potensial, pemberi pinjaman, serta pihak lain yang memberikan kredit, untuk mengambil keputusan dalam peran mereka sebagai penyokong keuangan (Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, 2017).

PSAK Nomor 1 Tahun 2022 Bagian 9 menegaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang situasi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari sebuah perusahaan yang berguna bagi sebagian besar pihak yang memanfaatkan laporan keuangan tersebut dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga mencerminkan tanggung jawab manajemen dalam mengurus sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan menurut (Kasmir, 2016):

1. Mengkomunikasikan informasi tentang beragam aset dan estimasi nilai harta yang dimiliki oleh perusahaan saat ini.
2. Menyajikan detail lengkap mengenai variasi dan jumlah kewajiban serta modal perusahaan pada saat ini.
3. Menyampaikan variasi dan total pemasukan yang berhasil didapat selama periode waktu tertentu.
4. Menyajikan rincian ragam dan jumlah biaya yang perusahaan keluarkan selama suatu rentang waktu tertentu.
5. Menyampaikan informasi mengenai perubahan yang telah terjadi pada harta, kewajiban, dan modal perusahaan.
6. Menyajikan gambaran mengenai bagaimana manajemen perusahaan beroperasi selama jangka waktu tertentu.
7. Memberikan informasi terperinci tentang catatan-catatan yang berkaitan dengan laporan keuangan.
8. Menyajikan informasi keuangan tambahan yang relevan.

## 4.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna harus memiliki sejumlah karakteristik yang memadai. Berikut ini beberapa karakteristik utama yang diperlukan:

1. Relevansi  
Data keuangan bermanfaat saat sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas informasi keuangan mempengaruhi hasil keputusan, terutama jika memiliki nilai prediktif dan konfirmatif. Menggunakan nilai prediktif memungkinkan pengguna membuat perkiraan tentang masa yang akan datang, sementara nilai konfirmatif memberikan umpan balik penting dalam evaluasi, yang dapat memperkuat atau mengubah penilaian sebelumnya.
2. Penyajian Jujur  
Menyajikan informasi keuangan secara jujur melibatkan penggambarannya sesuai dengan realitas fenomena ekonomi dalam laporan keuangan. Untuk memastikan kejujurannya, informasi keuangan harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Kelebihan lengkapnya mencakup semua elemen yang dibutuhkan untuk memahami fenomena yang dijelaskan, termasuk deskripsi

dan penjelasan yang relevan. Ketidakberpihakan atau netralitasnya mengindikasikan bahwa informasi keuangan disajikan tanpa memihak atau tendensi tertentu. Kebenaran atau ketiadaan kesalahan dalam informasi berarti bahwa tidak ada distorsi atau kekurangan dalam deskripsi fenomena dan bahwa proses penyusunan informasi telah dilakukan tanpa kesalahan yang signifikan.

### 3. Komparabilitas

Bagi pengguna, penting untuk membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu dan dengan perusahaan lain untuk menilai informasi keuangannya. Melalui perbandingan ini, mereka dapat melakukan analisis tren waktu, yang mencakup membandingkan laporan keuangan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi pola dalam situasi finansial dan kinerja perusahaan. Di samping itu, analisis antar perusahaan melibatkan perbandingan laporan keuangan dari berbagai perusahaan untuk mengevaluasi secara relatif posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Ini membantu pengguna mengenali dan memahami persamaan serta perbedaan di antara elemen-elemen tersebut, karena perbandingan memerlukan paling tidak dua elemen yang berbeda.

### 4. Dapat Dibuktikan (*verifiability*)

Membuktikan sesuatu membantu meyakinkan individu bahwa informasi yang diberikan jujur, bahkan jika tidak semua informasi itu berupa angka yang dapat diverifikasi. Proses verifikasi bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Verifikasi langsung merupakan konfirmasi langsung terhadap jumlah atau presentasi lainnya melalui observasi langsung. Misalnya, melakukan penghitungan uang kas atau pemeriksaan fisik jumlah barang di gudang. Sementara verifikasi tidak langsung adalah melakukan pengecekan terhadap input untuk model atau formula tertentu, menggunakan teknik lainnya, serta menghitung ulang hasilnya dengan metode yang sama. Sebagai contoh, memverifikasi jumlah barang di gudang dengan memeriksa input seperti mengalikan jumlah yang tercatat dengan biaya per unit.

### 5. Ketepatan Waktu

Menyampaikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan pada waktu yang sesuai memengaruhi keputusan

yang mereka buat. Informasi yang semakin lama cenderung kehilangan nilainya, tetapi terkadang masih penting karena beberapa pihak memerlukan data untuk melacak perkembangan dan analisis tertentu.

#### 6. Dapat Dipahami

Agar pengguna dapat memahami informasi keuangan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka, penting untuk menyajikan penjelasan yang jelas dan mempermudah aksesibilitas informasi keuangan. Contohnya, dengan mengelompokkan informasi, menegaskan fitur-fitur penting, serta menyampaikan informasi keuangan secara terperinci namun mudah dipahami, hal ini dapat meningkatkan kemudahan pemahaman terhadap informasi tersebut.

## 4.5 Jenis Laporan Keuangan

### 4.5.1 Laporan Laba Rugi (*income statement*)

#### 1. Definisi Laporan Laba Rugi (*income statement*)

Dokumen laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan yang diperoleh dan biaya yang terjadi selama periode tertentu guna menciptakan pendapatan. Laporan ini digunakan untuk menilai kinerja operasional perusahaan dalam rentang waktu tersebut (Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, 2017).

#### 2. Elemen-elemen Laporan Laba Rugi

Penghasilan (*income*) merujuk pada pertumbuhan keuntungan ekonomi selama jangka waktu tertentu dalam bentuk aliran uang yang diterima atau peningkatan nilai harta, atau pengurangan utang yang menghasilkan pertumbuhan ekuitas tanpa bersumber dari investasi modal (Panggabean, 2015).

Penghasilan meliputi: Pendapatan (*revenues*) keuntungan (*gains*) adalah hasil dari aktivitas suatu entitas yang sering disebut dengan penjualan, imbalan, dividen, bunga, royalti, dan sewa. Pendapatan diklasifikasikan kedalam pendapatan operasional (utama), dan pendapatan non-operasional. Keuntungan, di sisi lain, mencerminkan elemen lain yang memenuhi kriteria pendapatan tetapi bukan secara langsung pendapatan bersih. Saat keuntungan tersebut dicatat dalam laporan keuangan, biasanya

dipisahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, karena informasi tentang komponen tersebut sangat relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

- a. Beban (*expenses*) merujuk pada pengurangan nilai ekonomi dalam jangka waktu tertentu, dapat berupa pengeluaran uang, penurunan nilai aset, atau timbulnya tanggungan yang menyebabkan penurunan ekuitas tanpa hubungan dengan pembagian ke pemegang saham.

Beban mencakup biaya kegiatan dan kerugian, di mana biaya kegiatan merujuk pada pengeluaran yang muncul selama entitas menjalankan aktivitasnya, termasuk biaya utama penjualan, gaji, dan depresiasi yang umumnya terjadi dalam bentuk pengeluaran kas atau pengurangan dari sumber daya seperti uang tunai, inventaris, dan aset yang tidak bergerak. Kerugian atau keuntungan yang menggambarkan suatu item lain yang sesuai dengan kriteria beban yang mungkin, bisa timbul dari kegiatan rutin entitas. Dalam laporan keuangan, hal ini sering dibuat menjadi entitas terpisah karena informasi terkait sangat vital untuk keputusan ekonomi. Perbedaan antara pendapatan dan biaya merupakan laba bersih jika positif, dan sebaliknya, disebut rugi bersih.

3. Manfaat laporan laba rugi bagi pengguna
  - a. Mengevaluasi sejarah kinerja perusahaan dengan menganalisis pendapatan dan biaya guna menggambarkan operasional perusahaan dan memungkinkan perbandingan kinerja perusahaan dengan para pesaingnya.
  - b. Memberi landasan untuk meramalkan bagaimana kinerja akan menjadi di masa mendatang. Data mengenai hasil sebelumnya dapat memperkirakan pola penting yang, jika terus berlanjut, akan memberikan wawasan terhadap kinerja pada masa mendatang.
  - c. Menilai risiko dan ketidakpastian terkait dalam meraih arus kas masa depan dengan menggunakan informasi terkait pendapatan, beban, laba, rugi, keuntungan, dan kerugian. Menggambarkan hubungan antara elemen-elemen ini, laporan laba rugi dapat menjadi alat untuk mengevaluasi risiko terkait potensi ketidakcapaian arus kas pada periode mendatang.

4. Dalam pengungkapan hasil keuangan, terdapat dua jenis laporan laba rugi yang disajikan, yaitu:
  - a. Bentuk satu tahap (*single step*)

Laporan laba rugi yang disusun dalam satu format tunggal terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian pendapatan dan bagian biaya/pengeluaran. Bagian pemasukan mencakup semua pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode, termasuk pendapatan operasional dan keuntungan non-operasional. Sementara bagian pengeluaran mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam periode yang sama, termasuk biaya operasional dan kerugian non-operasional.
  - d. Bentuk beberapa tahap (*multi step*).

Laporan laba rugi dalam format multi step terbagi menjadi empat bagian utama, termasuk pendapatan dari operasi, biaya yang terkait dengan operasi, serta pendapatan serta kerugian non-operasional.

#### **4.5.2 Laporan Perubahan Ekuitas (*statement of changes in equity*)**

1. Definisi laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*). Adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi (Agus Purwaji, 2016).
2. Elemen laporan perubahan ekuitas terdiri dari:
  - a. Modal pada awal periode.
  - b. Perubahan (keuntungan) dan pengurangan (kerugian, pengeluaran pribadi) dalam satu periode.
  - c. Modal pada akhir periode.

Pembuatan laporan perubahan ekuitas terjadi setelah laporan laba rugi karena salah satu komponennya berisi informasi tentang laba atau rugi bersih dari periode yang bersangkutan. Laporan perubahan ekuitas dipersiapkan sebelum neraca keuangan karena berfungsi sebagai penghubung antara laporan laba rugi dan neraca.

#### **4.5.3 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

1. Laporan posisi keuangan sering dikenal sebagai neraca, adalah dokumen yang memperlihatkan nilai dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat akhir periode pelaporan mencerminkan posisi

keuangan pada titik waktu tersebut. Jadi, komponen-komponen yang tercantum dalam neraca adalah aset, kewajiban, dan ekuitas.

2. Elemen-elemen yang ada di neraca
  - a. Kekayaan (aset) dalam kepemilikan badan usaha disebabkan oleh kejadian masa lalu, dan diantisipasi memberikan nilai ekonomi di masa mendatang bagi entitas bisnis. Aset terbagi ke dalam dua kategori, yaitu aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang (aset likuid) dan aset yang tidak dapat dengan mudah diubah menjadi uang (aset tidak likuid). Aset lancar/likuid merupakan contohnya seperti dana tunai dan properti serta aset lain yang diinginkan untuk dijadikan uang, terjual, atau digunakan dalam kurun waktu satu tahun atau dalam jangka waktu operasional perusahaan. (Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, 2017) Aset yang termasuk dalam klasifikasi aset lancar meliputi uang tunai, investasi jangka pendek, piutang dagang, stok barang jualan, bahan habis pakai yang tersedia, biaya yang sudah dibayarkan di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Sebaliknya, *aset non-current*, yang merupakan bagian dari kategori aset yang tidak dapat diperoleh dengan mudah (*non-current assets*), merujuk pada aset yang tidak memenuhi syarat sebagai aset yang dapat diperoleh dengan mudah. Jenis aset *non-current* ini meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tak berwujud.
  - b. Kewajiban (Utang) adalah kewajiban saat ini dari suatu entitas bisnis yang berasal dari kejadian masa lampau. Penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya dari entitas bisnis yang memberikan manfaat ekonomi. Kewajiban dapat disusun ke dalam dua kategori utama, yaitu kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu dekat dan kewajiban yang memiliki jangka waktu penyelesaian yang lebih panjang. merujuk pada kewajiban yang bisa diselesaikan dalam periode rutin perusahaan, umumnya kurang dari dua belas bulan. Hal ini mencakup berbagai jenis kewajiban seperti utang bisnis, wesel yang masih harus dibayar, penerimaan pendapatan di muka, dan biaya yang belum diselesaikan. Di sisi lain, kewajiban jangka panjang merujuk pada kewajiban yang tidak termasuk dalam kategori kewajiban jangka pendek atau yang memerlukan lebih dari dua belas bulan untuk diselesaikan

dalam siklus operasional normal perusahaan. Kewajiban jangka panjang meliputi pinjaman dari bank, pinjaman dengan jaminan hipotek, dan hutang obligasi.

- c. Ekuitas (modal), yang juga dikenal sebagai modal, merupakan kepemilikan sisa atas nilai total aset suatu entitas setelah dipotong dengan semua utang yang dimilikinya. Komponen yang membentuk bagian dari ekuitas bervariasi tergantung pada jenis entitasnya. Pada perusahaan perorangan, komponen tunggalnya adalah investasi dari pemilik. Sementara pada perusahaan persekutuan, bagian dari ekuitasnya adalah investasi dari para mitra, dan pada perusahaan perseroan, ekuitas terdiri dari modal saham serta keuntungan yang masih tersisa.
3. Bentuk laporan posisi keuangan (neraca)
    - a. Bentuk akun (*account form*)

Neraca dalam bentuk akun (*account form*) dibuat menyamping, sehingga menyerupai huruf “T”, dimana posisi aset ditempatkan disebelah/sisi kiri sementara itu, kewajiban dan ekuitas diletakkan di sisi kanan. Kekurangan utama dari tata letak ini ialah perlunya ruang yang agak besar untuk menampilkan pos-pos yang bersebelahan. Biasanya, format akun memerlukan dua halaman yang saling menghadap.
    - b. Bentuk laporan (*report form*)

Laporan neraca dalam format bentuk (*report form*) disusun secara vertikal dari bagian atas ke bawah sehingga menyerupai suatu laporan. Posisi aset diletakkan pada urutan paling atas, kemudian posisi kewajiban dan urutan terakhir adalah posisi ekuitas.
  4. Keterbatasan laporan posisi keuangan (neraca)

Menurut (Giri, 2017), mengungkapkan keterbatasan laporan posisi keuangan (neraca) antara lain:

    - a. Laporan keuangan tidak menunjukkan nilai aktual saat ini. Aset dan kewajiban yang tercatat dalam laporan keuangan didasarkan pada biaya pada saat itu. Karena alasan ini, laporan keuangan sering kali disorot karena tidak memanfaatkan ukuran yang lebih sesuai seperti nilai pasar saat ini.

- b. Penyusunan laporan posisi keuangan berdasarkan pertimbangan (*judgment*). Banyak organisasi biasanya mempertimbangkan beragam faktor saat menentukan entri yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan mereka. Contohnya, hal tersebut terjadi dalam menetapkan tingkat pengelompokan utang, penjualan persediaan, masa pakai aset tetap, dan perkiraan barang terjual yang dapat menggunakan jaminan.
- c. Laporan keuangan seringkali mengabaikan sejumlah aspek yang memiliki nilai finansial bagi perusahaan. Beberapa faktor tersebut, seperti pengetahuan dan keahlian karyawan dalam mengembangkan teknologi komputer, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja bisnis, namun sulit untuk diukur secara obyektif. Begitu pula dengan aset tak berwujud lainnya seperti jumlah pelanggan, hasil riset, dan reputasi, yang tidak tercantum dalam laporan keuangan meskipun memiliki nilai yang penting bagi perusahaan.

#### **4.5.4 Laporan Arus Kas (statement of cash flows)**

Laporan arus kas adalah sebuah gambaran yang menunjukkan bagaimana uang diterima dan dihabiskan selama suatu periode akuntansi. Dokumen ini menggambarkan jumlah kas pada permulaan periode, tambahan kas selama periode tersebut, pengurangan kas dalam periode yang sama, serta jumlah kas pada akhir periode (Agus Purwaji, 2016).

Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang signifikan tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar dari suatu entitas selama periode waktu tertentu. Untuk mencapai hal ini, laporan arus kas menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Dampak dana yang diperoleh dari kegiatan operasional dalam rentang waktu tertentu.
2. Kegiatan transaksi berinvestasi.
3. Kegiatan transaksi pendanaan.
4. Perubahan total dalam kas perusahaan selama jangka waktu tertentu, yang memberikan pemahaman yang penting bagi investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya mengenai kondisi aset paling cair dalam perusahaan.

Laporan arus kas disusun berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. Aktivitas operasi (*operating activities*), merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas yang menyangkut operasional perusahaan. Aktivitas operasi ini akan mempengaruhi dalam penentuan laba neto seperti:
  - a. Menerima uang tunai dari penjualan produk dan layanan.
  - b. Menerima uang tunai dari royalti, biaya, komisi, dan penghasilan lainnya.
  - c. Memberikan pembayaran langsung dalam bentuk uang kepada pemasok barang dan layanan.
  - d. Membayar sejumlah uang secara langsung kepada pekerja atas namanya.
  - e. Pembayaran secara langsung dengan uang atau pengembalian pajak penghasilan, kecuali jika dapat dengan jelas diidentifikasi sebagai bagian dari aktivitas pendanaan atau investasi.
  - f. Menerima dan melakukan pembayaran dalam bentuk uang kontan dari investasi, pinjaman, dan kontrak lain yang dimiliki untuk tujuan perdagangan mirip dengan persediaan yang akan dijual kembali.
2. Kegiatan investasi adalah gambaran dari pengeluaran uang yang berkaitan dengan aset yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan aliran kas di masa mendatang, seperti:
  - a. Biaya yang dikeluarkan untuk akuisisi aset non-fisik, aset fisik, dan aset jangka panjang lainnya.
  - b. Pendapatan telah diterima dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.
  - c. Mengeluarkan dana dalam bentuk tunai untuk memperoleh investasi saham atau meminjam dari pihak lain, juga meliputi pembayaran bunga dalam kerja sama bisnis.
  - d. Menerima dana secara langsung dari penjualan saham atau pemberian pinjaman oleh pihak lain, serta menerima pendapatan bunga dari aktivitas bisnis bersama.
  - e. Pembayaran pertama dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
  - f. Menerima sejumlah uang secara langsung sebagai pengembalian dari dana yang telah diserahkan atau sebagai pelunasan dari pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

3. Aktivitas pendanaan (*financing activities*), meliputi investasi pemilik (penyetoran modal), pinjaman dana dari kreditur (bank) dan pelunasannya serta pengambilan kas oleh pemilik seperti:
  - a. Mendapatkan uang tunai dari penjualan saham atau instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan.
  - b. Menerima pembayaran secara langsung dalam bentuk pinjaman, baik dalam periode waktu yang singkat maupun yang lebih panjang.
  - c. Pengeluaran uang tunai kepada pemegang saham sebagai pengembalian saham yang diambil atau direngkuh oleh perusahaan.
  - d. Membayar kembali pinjaman yang telah diambil.
  - e. Pembelian kembali saham perusahaan.
4. Penyusunan laporan arus kas

Menurut (Dwi Martani, 2017) mengungkapkan bahwa, ada dua pilihan metode yang dapat dipilih oleh suatu badan usaha dalam menyusun laporan dari aliran uang yang berasal dari aktivitas operasional, yakni metode secara langsung dan tidak langsung.

Hanya dengan cara tertentu, laporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dapat disusun menggunakan metode sebagai berikut:

1) Metode langsung

Tahapan yang dibutuhkan dalam menerapkan metode langsung melibatkan mengidentifikasi total penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang berasal dari aktivitas operasional. Penggunaan teknik ini disarankan bagi perusahaan dalam menyusun laporan arus kas dari operasi karena dapat memberikan data yang diperlukan untuk perkiraan arus kas di masa depan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pendekatan tak langsung.

2) Metode tidak langsung

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam menyusun laporan aliran kas dari kegiatan operasional menggunakan metode tidak langsung:

- a. Menyusun analisis tentang kelebihan dan kekurangan dalam menjual investasi atau aset tak likuid lainnya.
- b. Menyusun perhitungan atas pengeluaran yang bukan dalam bentuk uang tunai seperti penurunan nilai aset dan penghapusan hutang secara berkala.

- c. Mencari perubahan yang terjadi pada saldo akun aset yang beredar dan kewajiban yang beredar.

Terdapat beberapa metode analisis yang dapat dimanfaatkan oleh investor, kreditor, dan pengguna informasi untuk menafsirkan laporan arus kas, yaitu:

1. Likuiditas Keuangan

Banyak orang yang membaca laporan keuangan mempertimbangkan kemampuan likuiditas perusahaan dengan memanfaatkan rasio cakupan kas terhadap utang lancar. Indikator ini menggambarkan apakah perusahaan bisa melunasi kewajiban jangka pendek dari pendapatan operasional pada tahun tertentu. Rumus yang digunakan adalah:

$$= \frac{\text{Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi}}{\text{Rata – rata Liabilitas Jangka Pendek}}$$

Semakin besar proporsi uang tunai yang tersedia dibanding utang lancar, semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Contohnya, ketika rasio mendekati 1:1 dianggap baik karena menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi semua kewajiban saat ini menggunakan arus kas yang sudah tersedia (Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, 2017).

2. Fleksibilitas Keuangan

Rasio cakupan utang kas (*cash debt coverage ratio*) memberikan pemahaman tentang sejauh mana suatu perusahaan memiliki fleksibilitas finansial. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya menggunakan kas yang dihasilkan dari operasionalnya tanpa harus menjual aset yang digunakan dalam kegiatan operasional. Rumus yang digunakan adalah:

$$= \frac{\text{Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi}}{\text{Rata – rata Total Liabilitas}}$$

Semakin tinggi rasio tersebut, semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar utangnya tepat waktu. Rasio ini mencerminkan apakah perusahaan mampu

melunasi utangnya dan bertahan saat dana eksternal terbatas atau terlalu mahal (Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, 2017).

3. Arus Kas Bebas (*free cash flow*)

Merupakan total arus kas yang tersedia bagi perusahaan untuk digunakan sesuai kebijakan perusahaan, entah untuk melakukan investasi tambahan, melunasi utang, atau membeli kembali saham perusahaan. Rumus yang digunakan adalah: = Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi-Pengeluaran Modal-Dividen

Semakin besar jumlah arus kas bebas, semakin besar jumlah fleksibilitas keuangan perusahaan.

#### 4.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Informasi tambahan yang ada di catatan laporan keuangan memberikan penjelasan secara detail atau deskriptif mengenai jumlah dan rincian elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan. Informasi dalam catatan tersebut juga meliputi detail mengenai entri-entri yang tidak memenuhi syarat untuk dilaporkan dalam laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Pencatatan pada laporan keuangan mencakup pengungkapan tentang aspek keuangan dan non-keuangan yang berasal dari berbagai entitas atau kejadian yang berpotensi memengaruhi status dan hasil keuangan suatu perusahaan (Martani, 2012). Berikut adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu:

1. Isi dari dokumen mencakup penjelasan mengenai prinsip penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi khusus yang digunakan oleh perusahaan.
2. Menyajikan data yang sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), namun tidak dimasukkan dalam dokumen laporan keuangan.
3. Menyajikan informasi tambahan yang berhubungan dengan pemahaman laporan keuangan, tetapi tidak disertakan secara langsung dalam laporan keuangan tersebut.

Penjelasan yang terdapat dalam catatan laporan keuangan dapat mengilustrasikan karakteristik kualitatif yang terkait dengan bagian-bagian khusus di dalam laporan keuangan.

Tujuan utama membuat catatan pada laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tambahan yang secara rinci menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaannya kepada para pihak yang terlibat.

Fungsi catatan atas laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Suatu perangkat yang menjelaskan cara atau landasan yang dipergunakan oleh suatu entitas dalam melakukan perhitungan atau menyusun laporan keuangannya.
2. Sebuah alat yang memberikan gambaran lebih terperinci kepada pemangku kepentingan tentang perusahaan untuk memahami informasi umum mengenai perusahaan.
3. Memberikan rincian lebih mendalam mengenai ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang krusial dalam penyajiannya informasi.
4. Menyajikan informasi mengenai beragam sumber daya yang tersedia dalam suatu perusahaan, seperti dana yang tersedia, kemampuan produksi, stok barang, dan elemen-elemen lainnya.
5. Menjelaskan pencapaian atau ketidakberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.
6. Menjelaskan hambatan dan masalah yang muncul di perusahaan saat mencapai sasaran keuangan yang telah ditetapkan.
7. Menjelaskan dengan lebih rinci tentang elemen-elemen yang termasuk dalam laporan keuangan.
8. Menjadi faktor pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Berikut merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam catatan pada laporan keuangan:

1. Ringkasan keseluruhan perusahaan
2. Ringkasan dari kebijakan akuntansi merupakan suatu hal yang signifikan.
3. Penyajian elemen-elemen dalam laporan keuangan
4. Pengelompokan tambahan terbagi menjadi dua kategori: data yang dibutuhkan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang tidak disertakan dalam laporan keuangan, dan informasi relevan lainnya yang tidak termasuk dalam laporan keuangan.

Rincian dari bagian catatan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar perusahaan yang terdiri dari komponen yaitu sebagai berikut:
  - a. Sejarah dan kegiatan perusahaan, status, dokumen pendirian, serta kisah berdirinya usaha.
  - b. Informasi yang diperlukan dalam penawaran publik efek mencakup nomor efektif dan/atau tanggal penawaran, jumlah dan jenis efek, serta bursa di mana efek tersebut didaftarkan.
  - c. Struktur perusahaan: identitas, persentase kepemilikan, dan total nilai aset.
  - d. Manajemen perusahaan: anggota direksi, karyawan, dewan komisaris, dan komite audit.
  - e. Publikasi laporan keuangan: waktu penerbitan laporan dan pihak yang bertanggung jawab serta memiliki otoritas atasnya.
2. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan terdiri dari komponen yaitu sebagai berikut:
  - a. Deklarasi tentang mematuhi Standar Akuntansi Keuangan.
  - b. Dasar dari pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
  - c. Kepemimpinan yang efektif melibatkan penggunaan penting dari pertimbangan, perkiraan, serta asumsi.
  - d. Suatu kebijakan yang diterapkan dalam bidang akuntansi adalah:
    - a) Prinsip-prinsip penggabungan
    - b) Gabungan entitas usaha.
    - c) Uang tunai dan setara uang.
    - d) Alat keuangan.
    - e) Stok barang.
    - f) Kegunaan properti sebagai bentuk investasi.
    - g) Aset yang mempertahankan nilainya.
    - h) Menanam modal dalam perusahaan yang terkait.
    - i) Peran pemilik saham dalam suatu kemitraan usaha.
    - j) Aset tanpa bentuk fisik
    - k) Aset yang tidak dapat dengan mudah diubah menjadi uang atau kumpulan aset yang direncanakan untuk dijual.
    - l) Pengurangan nilai dari aset non-keuangan.
    - m) Perjanjian penyewaan.
    - n) Persyaratan dan dasar penentuan provisi.
    - o) Deskripsi, kebijakan, dan variasi imbalan kerja.

- p) Saham perbendaharaan: metode pengakuan dan pengukuran.
  - q) Pembayaran dengan menggunakan saham.
  - r) Pengenalan pendapatan.
  - s) Pertukaran dan jumlah uang dalam valuta asing.
  - t) Bantuan dari pemerintah
  - u) Pengenaan pajak pendapatan meliputi tarif pajak, peraturan serupa, pajak ditangguhkan, serta metode penilaian aset untuk pajak yang ditunda.
  - v) Biaya peminjaman
  - w) Bagian operasional
  - x) Keuntungan atau kerugian per lembar saham, yang mencakup perhitungan dasar dari laba (rugi) per saham sebelum dilakukan penyesuaian dan setelah dilakukan penyesuaian akibat dilusi.
3. Pengungkapan dari item-item dalam laporan keuangan terdiri dari elemen-elemen berikut ini:
- a. Aset. Umumnya dibagi ke dalam kategori:
    - 1) Aset yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang dalam waktu singkat meliputi uang kas, pembayaran pajak di muka, piutang dagang, investasi keuangan, persediaan, serta biaya yang sudah dibayarkan di muka.
    - 2) Aset yang tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang kontan. (termasuk utang dari pihak terkait yang bukan dari aktivitas bisnis, properti yang diinvestasikan, investasi dalam entitas mitra, aset yang tidak berwujud, dan aset tetap).
  - b. Liabilitas. Biasanya disajikan dalam kategori:
    - 1) Kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, seperti utang dagang, kewajiban pajak, pengaturan dana, biaya yang belum diselesaikan, kewajiban terkait imbalan kerja yang jatuh tempo dalam waktu dekat, kewajiban terkait aset dan bagian yang akan diselesaikan dalam waktu dekat dari kewajiban jangka panjang, serta kewajiban keuangan lainnya.
    - 2) Kewajiban yang perlu diselesaikan dalam periode waktu yang lebih panjang, seperti utang kepada pihak terkait yang bukan dalam lingkup usaha, utang dari kontrak Menyewa sumber pembiayaan seperti pinjaman dari bank dan lembaga keuangan dengan jangka waktu yang lama, serta

menggunakan instrumen keuangan seperti obligasi, obligasi yang dapat dikonversi, dan sukuk, serta kewajiban subordinasi.

- c. Kepemilikan saham. Bagian-bagian yang masuk ke dalam ekuitas, antara lain:
  - 1) Saham ekuitas.
  - 2) Investasi tambahan yang telah disetor.
  - 3) Perbedaan transaksi dengan pihak non-pengendali.
  - 4) Saham perusahaan yang dibeli kembali.
  - 5) Sisa laba.
  - 6) Penerimaan (penjualan produk, layanan, bunga, royalti, dividen).
  - 7) Pengeluaran (biaya pokok penjualan dan biaya operasional).
  - 8) Pendapatan menyeluruh lainnya (ulasan kembali atas nilai aset, program keuntungan yang terjamin, perbedaan dalam nilai tukar, alat perlindungan untuk arus kas).
- d. Informasi tambahan diungkapkan. Bagian-bagian dari komponen ini meliputi:
  - a) Transaksi antara pihak terkait.
  - b) Pajak pendapatan.
  - c) Aset dan kewajiban dalam mata uang asing.
  - d) Kegiatan usaha yang telah dihentikan.
  - e) Nilai yang adil dari instrumen keuangan.
  - f) Penurunan nilai aset yang bukan dalam bentuk keuangan.
  - g) Bagian partisipasi dalam usaha patungan.
  - h) Instrumen derivatif diluar dari derivatif yang melekat.
  - i) Pengelolaan risiko keuangan.
  - j) Kewajiban dan situasi yang mungkin terjadi.
  - k) Bagian operasional.
  - l) Pembayaran menggunakan saham sebagai basisnya.
  - m) Manajemen modal.
  - n) Transaksi non-tunai.
  - o) Peristiwa setelah periode pelaporan.
  - p) Informasi terbaru mengenai aturan dan standar akuntansi keuangan yang terkait dengan aktivitas perusahaan.
  - q) Perubahan dalam perkiraan akuntansi, modifikasi kebijakan akuntansi, serta kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.
  - r) Informasi yang signifikan lainnya.

- s) Pengelompokan ulang.
- t) Penggabungan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan regulasi yang berlaku di luar negeri.



# Bab 5

## Analisis Rasio Keuangan

### 5.1 Pendahuluan

Rasio adalah alat yang memberikan pemahaman tentang kondisi dasarnya. Dengan kesimpulan yang tepat, rasio bisa menunjukkan area yang perlu diteliti lebih lanjut. Dengan menggunakan analisis rasio, keterkaitan penting dapat teridentifikasi dan memberikan dasar yang kuat, perbandingan untuk mengungkap kondisi yang sulit terdeteksi dengan memeriksa setiap elemen rasio tersebut. Maka, manfaat dari rasio sesuai dengan kemampuan dalam mengaplikasikannya dan memahaminya.

Rasio keuangan merujuk pada perbandingan atau ukuran yang dihasilkan dari elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan. Fungsinya meliputi evaluasi kinerja perusahaan, perbandingan kinerja dari periode ke periode, dan perbandingan antara performa berbagai perusahaan. Penggunaan analisis rasio keuangan adalah metode untuk mengevaluasi data kuantitatif yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan atau usaha dengan membandingkan nilai-nilai secara matematis.

Analisis sering digunakan untuk menentukan strategi perencanaan masa depan suatu entitas bisnis. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui potensi kelayakan untuk memperoleh investasi atau sumber dana demi kelangsungan bisnis tersebut. Pada umumnya analisis terhadap rasio keuangan perusahaan dilakukan pada akhir periode pembukuan keuangan dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan rasio keuangan meliputi evaluasi kinerja keuangan di masa yang telah berlalu, masa sekarang dan masa depan perusahaan.

Evaluasi kinerja laporan keuangan suatu entitas bisnis seringkali menggunakan analisis rasio-rasio keuangan yang umum. Keuntungan mengevaluasi dengan metode rasio ini adalah perlakuan perhitungan yang sederhana. Meskipun demikian terdapat juga kelemahan dimana perhitungan tersebut tidak terlalu akurat, yang memiliki pengaruh terhadap rasio keuangan, termasuk efek dari peristiwa ekonomi, faktor-faktor industri, kebijakan manajemen, dan cara penggunaan metode akuntansi. Ketika ukuran akuntansi terbatas, hal ini dapat memengaruhi seberapa efektif rasio-rasio tersebut.

Rasio perlu dipahami secara hati-hati karena elemen yang memengaruhi angka atasnya bisa saling terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi angka bawahnya. Seorang analis perlu melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menjadi dasar dari pembentukan rasio tersebut, serta untuk menggabungkan berbagai rasio dengan cara yang efisien guna mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Oleh karena itu penilaian keuangan perusahaan harus tetap dilakukan sebagai tindakan untuk kinerja keuangan di masa depan. Perusahaan yang didirikan untuk tujuan jangka panjang memiliki fokus yang berorientasi kepada keuntungan yang maksimal. Kinerja yang baik akan membuat bisnis lancar, dan citra perusahaan semakin dikenal masyarakat luas.

## 5.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan

Beberapa perusahaan umumnya menggunakan berbagai jenis rasio keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja perusahaan seperti:

### 5.2.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah sebuah metode untuk mengevaluasi sejauh mana suatu perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo kepada pihak pemberi pinjaman. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang dengan utang yang harus segera dilunasi. Dengan demikian, rasio likuiditas mencerminkan kemampuan keuangan suatu entitas dalam menyelesaikan kewajiban finansialnya dalam waktu yang sesuai.

Memfaatkan rasio likuiditas dapat membantu dalam menilai seberapa baik bisnis dapat membayar hutangnya ketika jatuh tempo, dan menilai

kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab keuangan dalam periode yang berbeda, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan memanfaatkan total aset yang dapat segera diuangkan. Pentingnya informasi tambahan dalam mengevaluasi likuiditas terletak pada periode waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang dan persediaan menjadi uang tunai. Beberapa rasio yang bisa dipakai untuk menilai rasio likuiditas meliputi:

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Perhitungan rasio lancar umumnya melibatkan pembagian aset lancar dengan kewajiban lancar. Hasilnya dapat memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban lancarnya dalam waktu yang singkat. Namun perlu diperhatikan bahwa rasio likuiditas secara keseluruhan dapat bervariasi tergantung pada perusahaan, ukuran perusahaan dan kondisi perekonomian secara umum. *Current Ratio* juga dikatakan sebagai *margin of safety* (pengukur tingkat keamanan).

$$\text{Current Ratio (Rasio Lancar)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

2. *Quick Ratio / Acid Test Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio Cepat secara keseluruhan merupakan hasil selisih antara aset lancar yang kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Hasilnya dapat menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan atau bisnis. *Quick Ratio* dinilai lebih teliti dikarenakan dalam rasio ini persediaan dan biaya dibayar dimuka dieliminasi dari total aset lancar, sehingga tersisa aset lancar yang kemudian dibagi dengan kewajiban. Hasil perhitungan dengan menggunakan rasio ini akan semakin baik apabila hasil perhitungannya mendekati 100%.

$$\text{Quick Ratio (Rasio Cepat)} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek} + \text{Piutang}}{\text{Utang Lancar}}$$

3. *Cash Ratio* (Rasio Kas)

Rasio Kas adalah ukuran yang menilai kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan utang jangka pendek dengan menggunakan jumlah kas dan aset yang mudah diubah menjadi kas yang dimiliki. Cara

menentukan rasio keuangan adalah dengan menjumlahkan total kas dan setara kas dan membaginya dengan utang lancar.

$$\text{Cash Ratio (Rasio Kas)} = \frac{\text{Kas + Efek}}{\text{Utang Lancar}}$$

4. *Working Capital to Total Assets Ratio* (Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset)

Rasio ini menunjukkan perbandingan modal kerja bersih terhadap total aktiva. Modal kerja bersih disini mengacu pada selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar.

$$\text{Working Capital to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang lancar}}{\text{Jumlah Aktiva}}$$

### 5.2.2 Rasio Solvabilitas / Leverage

Rasio solvabilitas, yang sering disebut sebagai rasio Leverage, digunakan untuk menilai sejauh mana pinjaman yang digunakan untuk mendanai aset perusahaan. Ini mencerminkan seberapa besar penggunaan hutang dalam mendanai operasionalnya dibandingkan dengan modal perusahaan itu sendiri.

Rasio *Leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa pinjaman yang lebih besar juga, dan ini berarti posisi keuangan perusahaan tidak sehat dan berpotensi beresiko. Dalam penimbangan biaya aktiva secara langsung, ukuran solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas dapat menunjukkan kondisi perusahaan yang lebih negatif daripada yang sebenarnya. Fenomena ini disebabkan oleh beban biaya langsung yang menyebabkan penurunan nilai ekuitas, terutama pada perusahaan dengan aset yang produktif. Beberapa jenis rasio solvabilitas / *Leverage* adalah :

1. *Total Debt to equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Modal)

*Debt to equity Ratio* (DER) digunakan untuk membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas. Selain itu rasio ini juga digunakan untuk mengukur investasi pada perusahaan. Hutang merupakan suatu kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan dengan membayar krediturnya secara tunai. Di mana masa tenggang pembayaran dibagi menjadi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan utang lainnya. Sedangkan ekuitas adalah kepemilikan perusahaan atas aset bersihnya, yang terdiri atas sisa keuntungan (laba) periode sebelumnya dan setoran pemilik.

Apabila rasio hutang terhadap modal tinggi, maka kewajiban perusahaan dalam membayar hutang pun besar, demikian pula sebaliknya. Rasio kecil antara utang dan modal mencerminkan keadaan finansial perusahaan yang sehat serta peningkatan kemampuan perusahaan untuk bertahan saat kondisi ekonomi buruk, sambil tetap dapat memenuhi tanggung jawab kepada pihak pemberi pinjaman.

$$\text{Total Debt to equity Ratio} = \frac{\text{Utang Lancar} + \text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}}$$

2. *Total Debt to Total Capital Assets Ratio* (Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset)

Rasio total hutang terhadap total aset adalah perbandingan yang mengukur kapasitas aset suatu perusahaan untuk menutupi hutang yang dimiliki oleh entitas bisnis tersebut. Semakin besar rasio utang terhadap aset, semakin besar kemungkinan perusahaan sulit melunasi utangnya, yang berpotensi menimbulkan risiko lebih tinggi bagi para investor yang ingin berinvestasi dalam perusahaan tersebut.

$$\text{Total Debt to Total Capital Assets} = \frac{\text{Utang Lancar} + \text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Jumlah Modal/Aktiva}}$$

3. *Long term Debt to equity Ratio* (Rasio Hutang Jangka Panjang Terhadap Modal Sendiri)

Rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas adalah perbandingan antara jumlah pinjaman jangka panjang dengan investasi pemilik perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan modal dapat menanggung hutang jangka panjang perusahaan. Pengukuran dari perbandingan ini mampu mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan.

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}}$$

4. *Tangible Assets Debt Coverage*

*Tangible Assets Debt Coverage* (TADC) merupakan perbandingan yang digunakan untuk mengukur proporsi aset fisik yang dimiliki suatu perusahaan terhadap kewajiban jangka panjang yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dapat mengungkapkan bagaimana

aset tetap digunakan untuk mengamankan kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut.

$$\text{Tangible Assets Debt Coverge} = \frac{\text{Jumlah Aktiva} - \text{Intangibles} - \text{Utang Lancar}}{\text{Hutang jangka panjang}}$$

### 5.2.3 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas ialah metode rasio keuangan yang dipakai untuk menilai seberapa efisien modal kerja perusahaan ketika sedang menjalankan operasinya. Rasio aktivitas juga sering dikatakan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan aset perusahaan secara efisien.

Rasio aktivitas ini dapat membantu manajemen perusahaan dalam menilai kredit macet yang terjadi, memperkirakan seberapa besar kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran, menentukan berapa lama barang disimpan di gudang, dapat juga dipakai untuk mengetahui berapa jumlah investasi pada aset tetap dan juga untuk mengetahui seberapa cepat uang dapat diubah menjadi modal kerja siap pakai. Berikut ini beberapa jenis rasio aktivitas diantaranya yaitu:

1. *Total Assets Turnover* (Perputaran Aktiva)

*Total assets turnover* (perputaran aktiva) adalah perbandingan penjualan terhadap total aset suatu bisnis dimana menggambarkan tingkat perputaran total aset selama periode waktu tertentu.

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan Netto}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Receivable Turnover* (Perputaran Piutang)

Perputaran piutang adalah sebuah rasio yang digunakan untuk menentukan nilai rata-rata piutang yang dibandingkan dengan total penjualan.

$$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Rata - rata Piutang}}$$

3. *Working Capital Turnover* (Perputaran Modal Kerja)

Rasio perputaran modal kerja adalah ukuran yang membandingkan penjualan dengan modal kerja dalam suatu bisnis entitas.

$$\text{Working Capital Turnover} = \frac{\text{Penjualan Netto}}{\text{Aktiva lancar} - \text{Utang lancar}}$$

4. *Fixed Assets Turnover* (Perputaran Aset Tetap)

Rasio perputaran modal kerja adalah ukuran yang membandingkan penjualan dengan modal kerja dalam suatu bisnis entitas terhadap kepemilikan aset tetap suatu bisnis.

$$\text{Fixed Assets Turnover (Perputaran Aset Tetap)} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap}}$$

5. *Inventory Turnover* (Perputaran Persediaan)

Angka tersebut digunakan untuk mengukur seberapa frekuensinya dana yang diinvestasikan dalam stok bergerak selama periode waktu tertentu. Juga mencerminkan seberapa sering persediaan tersebut berputar dalam setahun. Semakin frekuensi perputaran stok meningkat, semakin menguntungkan, tetapi sebaliknya, semakin rendah perputaran stok, semakin merugikan.

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Harga pokok barang yang dijual}}{\text{Rata - rata persediaan}}$$

### 5.2.4 Rasio Profitabilitas

Profitabilitas rasio merupakan ukuran yang mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam menciptakan keuntungan. Rasio yang menggambarkan seberapa efektif pengelolaan suatu perusahaan dapat bermacam-macam, tetapi salah satu rasio umum yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Profit Margin (Profit Margin on Sales)*

Rasio ini mengevaluasi persentase dari laba bersih terhadap jumlah penjualan.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Keuntungan Neto Sesudah Pajak}}{\text{Net sales}}$$

2. *Return on Investment (ROI)*

Rasio yang menggambarkan tingkat pengembalian atas investasi yang telah digunakan dalam operasional perusahaan, diukur sebagai sebuah persentase. Dalam mengevaluasi penanaman modal, manajemen akan membandingkan berbagai proyek dan memilih proyek yang memberikan rate of return.

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Keuntungan Neto Sesudah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

### 3. *Return on Equity (ROE)*

Angka yang digunakan untuk mengevaluasi laba setelah pajak dalam perbandingan dengan investasi perusahaan. Angka tersebut merupakan indikator dari efisiensi penggunaan modal perusahaan; semakin tinggi angka tersebut, semakin efisien pemanfaatan modal yang dilakukan.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Keuntungan Neto Sesudah Pajak}}{\text{Modal}}$$

### 4. *Earning Power of Total Investment (Rate of Return on Total Assets)*

Rasio ini menggambarkan kapasitas modal yang digunakan dalam aset untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh para investor.

$$\text{Rate Return on Total Assets} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

## 5.3 Bahan Evaluasi

Sebagai contoh konkret terhadap analisis rasio keuangan dapat dilihat contoh sebuah neraca dan laporan laba rugi dari suatu entitas bisnis, sebagai berikut:

PT. Puncak Jaya  
Laporan Neraca  
Per 31 Desember 2022

#### Aktiva

##### Aktiva Lancar :

Kas	Rp 300.000	
Efek	Rp 300.000	
Piutang	Rp 240.000	
Persediaan	<u>Rp 1.260.000</u>	
Jumlah Aktiva Lancar		Rp 2.100.000

##### Aktiva Tetap :

Tanah	Rp 150.000
Aset tidak berwujud	Rp 150.000
Mesin	Rp 1.050.000
Akumulasi depresiasi	<u>(Rp 150.000)</u>
	Rp 900.000
Bangunan	Rp 1.500.000
Akumulasi depresiasi	<u>(Rp 300.000)</u>

	Rp 1.200.000	
Jumlah Aktiva Tetap		Rp 2.400.000
<b>Total Aktiva</b>		<b><u>Rp 4.500.000</u></b>
<b>Passiva</b>		
Utang Lancar :		
Utang dagang	Rp 450.000	
Utang wesel	Rp 150.000	
Utang pajak	<u>Rp 240.000</u>	
Jumlah Utang Lancar		Rp 840.000
Utang Jangka Panjang :		
Utang Obligasi 5%		Rp 900.000
Modal :		
Modal saham	Rp 1.800.000	
Agio saham	Rp 300.000	
Laba ditahan	Rp 660.000	
Jumlah Modal		<u>Rp 2.760.000</u>
<b>Total Passiva</b>		<b><u>Rp 4.500.000</u></b>

PT. Puncak Jaya  
Laporan Rugi/Laba  
Per 31 Desember 2022

Penjualan	Rp 6.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 4.500.000</u>
Laba Bruto	Rp 1.500.000
Biaya Administrasi dan Umum	<u>Rp 855.000</u>
Keuntungan Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT)	Rp 645.000
Bunga Obligasi (5% x Rp 900.000)	<u>Rp 45.000</u>
Keuntungan sebelum pajak	Rp 600.000
Pajak penghasilan	<u>Rp 240.000</u>
Keuntungan Netto Sesudah Pajak (EAT)	<u>Rp 360.000</u>

Berdasarkan data dari laporan keuangan di atas, maka dapat dihitung berbagai jenis rasio keuangan, seperti di bawah ini:

1. Rasio Likuiditas

$$\text{Current Ratio (Rasio Lancar)} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp } 2.100.000}{\text{Rp } 840.000} \\
 &= 2,5 \text{ (250\%)}
 \end{aligned}$$

Artinya:

Total aset aktiva lancar adalah 2,5 kali lipat dari jumlah utang yang harus segera dilunasi, atau dengan kata lain, setiap Rp 1 utang yang harus segera dilunasi dijamin oleh Rp 2,5 harta yang dapat segera diuangkan.

$$\begin{aligned}
 \text{Quick Ratio} &= \frac{\text{Kas} + \text{Efek} + \text{Piutang}}{\text{Utang Lancar}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 300.000 + \text{Rp } 300.000 + \text{Rp } 240.000}{\text{Rp } 840.000} \\
 &= 1 \text{ (100\%)}
 \end{aligned}$$

Artinya:

Kinerja perusahaan pada tahun laporan 2022 tergolong positif karena hampir sebanding dengan rata-rata industri. Setiap kewajiban yang jatuh tempo sebesar Rp 1 dijamin oleh aset cepat sebesar Rp 1.

$$\begin{aligned}
 \text{Cash Ratio} &= \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Utang Lancar}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 300.000 + \text{Rp } 300.000}{\text{Rp } 840.000} \\
 &= 0,7142 \text{ (71,42\%)}
 \end{aligned}$$

Artinya :

Pada laporan keuangan tahun 2022, rasio keuangan menunjukkan kinerja yang memadai, dengan setiap Rp 1 utang yang jatuh tempo didukung oleh uang tunai dan surat berharga senilai Rp 0,71.

$$\begin{aligned}
 \text{Working Capital to} &= \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}{\text{Jumlah Aktiva}} \\
 \text{Total Assets Ratio} &= \frac{\text{Rp } 2.100.000 - \text{Rp } 840.000}{\text{Rp } 4.500.000} \\
 &= 0,28 \text{ (28\%)}
 \end{aligned}$$

Artinya:

Proporsi modal kerja terhadap total asset atau selisih antara asset lancar dengan utang lancar.

## 2. Rasio Solvabilitas

$$\begin{aligned} \text{Total Debt to equity Ratio} &= \frac{\text{Utang Lancar} + \text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}} \\ &= \frac{\text{Rp } 840.000 + \text{Rp } 900.000}{\text{Rp } 2.760.000} \\ &= 0,63 \text{ (63 \%)} \end{aligned}$$

Artinya:

Tahun 2022 melihat kreditur memberikan pendanaan sebesar 63% dari setiap unit mata uang yang ditanamkan oleh para pemegang saham.

$$\begin{aligned} \text{Total Debt to Total} &= \frac{\text{Utang Lancar} + \text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Jumlah Modal/Aktiva}} \\ \text{Capital Assets} &= \frac{\text{Rp } 840.000 + \text{Rp } 900.000}{\text{Rp } 4.500.000} \\ &= 0,386 \text{ (38,6\%)} \end{aligned}$$

Artinya:

Pada tahun 2022 sebanyak 38,6% dari aktiva perusahaan didanai oleh hutang (modal pinjaman). Sebesar Rp 63,- modal sendiri menjadi jaminan hutang.

$$\begin{aligned} \text{Long Term Debt to Equity Ratio} &= \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}} \\ &= \frac{\text{Rp } 900.000}{\text{Rp } 2.760.000} \\ &= 0,32 \text{ (32\%)} \end{aligned}$$

Artinya:

Pembayaran hutang jangka panjang menggunakan sebagian dari modal sendiri sebesar Rp 0,32 sebagai jaminan.

$$\begin{aligned} \text{Tangible Assets} &= \frac{\text{Jumlah Aktiva} - \text{Intangibles} - \text{Utang Lancar}}{\text{Hutang jangka Panjang}} \\ \text{Debt Coverage} &= \frac{\text{Rp } 4.500.000 - \text{Rp } 150.000 - \text{Rp } 840.000}{\text{Rp } 900.000} \\ &= 3,9 \text{ (390\%)} \end{aligned}$$

Artinya:

Setiap rupiah utang jangka panjang dijamin oleh aktiva tidak berwujud (tangible assets) sebesar Rp3,9.

### 3. Rasio Aktivitas

$$\begin{aligned} \text{Total Assets Turnover} &= \frac{\text{Penjualan Netto}}{\text{Total Aktiva}} \\ &= \frac{\text{Rp 6.000.000}}{\text{Rp 4.500.000}} \\ &= 1,33 \text{ (133\%)} \end{aligned}$$

Artinya:

Setiap rupiah asset dalam setahun mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,33. Jumlah rupiah yang tertanam pada seluruh asset rata-rata dalam setahun meningkat 1,33 kali lipat.

$$\begin{aligned} \text{Receivable Turnover} &= \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Rata - rata Piutang}} \\ &= \frac{\text{Rp 6.000.000}}{\text{Rp 240.000}} \\ &= 25\% \end{aligned}$$

Artinya:

Setahun rata-rata investasi dana pada utang meningkat 25 kali lipat.

$$\begin{aligned} \text{Working Capital Turnover} &= \frac{\text{Penjualan Netto}}{\text{Aktiva Lancar - Utang Lancar}} \\ &= \frac{\text{Rp 6.000.000}}{\text{Rp 2.100.000 - Rp 840.000}} \\ &= 4,76 \text{ kali} \end{aligned}$$

Artinya:

Modal yang dimasukkan ke dalam modal kerja rata-rata berputar 4,8 kali per tahun.

$$\begin{aligned} \text{Fixed Assets Turnover} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap}} \\ &= \frac{\text{Rp 6.000.000}}{\text{Rp 2.400.000}} \\ &= 2,5 \text{ kali} \end{aligned}$$

Artinya:

Dana yang diinvestasikan dalam aset tetap berputar sebanyak 2,5 kali dalam jangka waktu tertentu.

$$\begin{aligned} \text{Inventory Turnover} &= \frac{\text{Harga pokok barang yang dijual}}{\text{Rata - rata Persediaan}} \\ &= \frac{\text{Rp } 4.500.000}{\text{Rp } 1.260.000} \\ &= 3,57 = 4 \text{ kali (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Artinya:

Rasio ini menunjukkan persediaan diganggi sebanyak 4 kali dalam setahun. Kemudian persediaan tersimpan di gudang rata-rata 90 hari (360 dibagi 4).

#### 4. Rasio Profitabilitas

$$\begin{aligned} \text{Profit Margin} &= \frac{\text{Net profit after tax}}{\text{Net Sales}} \\ &= \frac{\text{Rp } 360.000}{\text{Rp } 6.000.000} \\ &= 6\% \end{aligned}$$

Artinya:

Setiap Rp 1,- penjualan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 6%.

$$\begin{aligned} \text{Return on Investment} &= \frac{\text{Net profit after tax}}{\text{Total Assets}} \\ &= \frac{\text{Rp } 360.000}{\text{Rp } 4.500.000} \\ &= 8\% \end{aligned}$$

Artinya:

Setiap Rp 1,- total aset menghasilkan keuntungan bersih sebesar 8%.

$$\begin{aligned} \text{Return on Equity} &= \frac{\text{Net profit after tax}}{\text{Equity (modal)}} \\ &= \frac{\text{Rp } 360.000}{\text{Rp } 2.760.000} \end{aligned}$$

$$= 13\%$$

Artinya:

Setiap Rp 1,- pemakaian modal menghasilkan keuntungan bersih 13%.

$$\begin{aligned} \text{Rate Return on Total Assets} &= \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Assets}} \\ &= \frac{\text{Rp } 645.000}{\text{Rp } 4.500.000} \\ &= 14\% \end{aligned}$$

Artinya:

Setiap Rp 1,- dari modal yang ditanamkan ke dalam seluruh aktiva mampu menghasilkan keuntungan bersih sebesar 14%.

# Bab 6

## Anggaran Modal dan Analisis Investasi

### 6.1 Pendahuluan

Di era persaingan bisnis yang semakin intens, ini membuat perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang harus memiliki kekuatan dalam mempertahankan kegiatan bisnis perusahaan. Dalam hal itu perusahaan berupaya untuk melakukan perencanaan strategis bisnis yang baik. Upaya tersebut salah satunya berupa keputusan dalam berinvestasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan investasi sangat erat kaitannya dengan anggaran modal (*Capital Budgeting*) dan struktur kekayaan sebuah perusahaan yang berupa komposisi dari aset.

Anggaran "Modal" adalah "proses sebuah perusahaan dalam membuat rencana dana untuk kegiatan investasi. (T. Keown, Martin, 2011) juga menjelaskan bahwa anggaran modal merupakan proses dalam evaluasi dan pemilihan terhadap investasi yang lebih dari satu tahun agar dapat konsisten dengan tujuan perusahaan.

Adapun tujuan dari *Capital Budgeting* tersebut sebagai berikut:

1. Agar dapat memberikan rincian kebutuhan dana, sebab dana dengan jumlah yang besar dapat mengikat dengan jangka waktu panjang.
2. Agar investasi dilakukan dengan akurat agar tidak mengalami kelebihan atau kekurangan investasi.

3. Menghindari kesalahan saat membuat keputusan dengan langkah-langkah pencegahan.

Dalam bab ini penulis akan membahas struktur modal yang optimal, menganalisis arus kas perusahaan, pengambilan keputusan investasi, pemahaman mengenai portofolio dan pasar modal, serta pemahaman mengenai *return* dan risiko dalam berinvestasi.

## 6.2 Struktur Modal

Struktur modal (*capital structure*) ialah perbandingan antara pinjaman jangka panjang dan dana yang dimiliki perusahaan (Martono dan Agus, 2008). Hubungan erat antara struktur modal dan penetapan kombinasi belanja modal jangka panjang perusahaan disebabkan oleh fakta bahwa struktur modal merupakan bagian integral dari kerangka keuangan perusahaan. Gabungan dari beberapa akun pasiva itulah yang disebut dengan struktur keuangan, sedangkan gabungan dari beberapa anggaran belanja jangka panjang disebut dengan Struktur modal (Warsono, 2003).

Pendanaan yang efektif diperkuat oleh penerapan struktur modal yang tepat. Struktur modal yang optimal dapat mengurangi biaya dari penggunaan modal secara keseluruhan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Secara prinsip, perusahaan seharusnya lebih memprioritaskan sumber daya internal ketika mencoba memenuhi kebutuhannya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Namun, jika kebutuhan keuangan meningkat dan sumber daya internal tidak mencukupi, maka mengambil utang atau menerbitkan saham baru bisa menjadi alternatif untuk mengatasi situasi tersebut. Disamping itu risiko finansial akan lebih besar apabila dalam pemenuhan kebutuhan dananya tergantung dari pihak eksternal. Sebaliknya jika biaya akan semakin mahal jika menggantungkan pemenuhan modal pada saham. Upaya dalam menyeimbangkan kedua sumber pendanaan tersebut agar optimal merupakan antisipasi hal tersebut. Perusahaan juga dituntut berhati-hati pada saat penentuan struktur modal optimal karena dengan segala keadaan diharapkan agar jumlah hutang tidak melebihi jumlah modal internal atau yang menjadi jaminan.

Dalam konsep *Cost of Capital*, perusahaan berupaya mencapai struktur modal yang ideal untuk mengurangi biaya penggunaan modal rata-rata (Riyanto, 2013). Perbandingan antara masing-masing pendanaan dan biaya

dari setiap komponen sumber dana dapat memengaruhi tingkat rata-rata biaya modal, baik yang tinggi maupun rendah. Saat nilai perusahaan maksimal biaya rata-rata tertimbang turun dari struktur modal maka dapat dikatakan struktur modal tersebut optimal (Sartono, 2012).

Ketika struktur modal menjadi relevan, baik karena alasan pajak atau faktor lainnya, tidak akan terjadi langsung kolaborasi antara investasi dan pendanaan. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah menentukan terlebih dahulu program investasi sebelum menentukan cara mendanainya. Hal ini bertujuan agar keputusan investasi dapat diperhitungkan secara tepat untuk meningkatkan nilai perusahaan. Keputusan mengenai investasi sebaiknya tidak tergantung pada keputusan pendanaan dan seharusnya mandiri.

### 6.2.1 Teori Struktur Modal

Berikut beberapa teori terkait dengan struktur modal (Susanti and Agustin, 2015):

1. *Pecking Order Theory*

Pada teori ini tidak ada indikasi target struktur modal melainkan berusaha menjelaskan runtutan dari pendanaan. Sehingga dalam teori ini menjelaskan alasan perusahaan mendapatkan keuntungan tinggi namun tingkat utang yang rendah. Jika tingkat keuntungan tinggi dana yang ada di Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dalam investasi. Maka dari itu dari sisi *Pecking Order Theory* tingkat utang yang optimal tidak lagi diperhitungkan, yang lebih diutamakan oleh manajer”keuangan yaitu kebutuhan investasinya.

2. *Trade of Theory*

Untuk menentukan struktur modal optimal teori ini mempertimbangkan faktor-faktor dalam mempertahankan keseimbangan dan manfaat penggunaan hutang seperti pajak, biaya agensi dan *financial distress*.

3. Modigliani dan Miller

Franco Modigliani dan Merton Miller (MM) merupakan pelopor teori struktur modal modern pada tahun 1958. Setelah itu, MM mengembangkan cara biaya modal perusahaan dalam lingkungan

pasar keuangan yang ideal tanpa mempertimbangkan faktor pajak.

Berikut rumusan MM:

$$K_e = K_{eu} + (K_{eu} - K_d) (B/S)$$

Dimana:

$K_e$  :Biaya "modal sendiri"

$K_{eu}$  :Biaya "modal sendiri tanpa adanya hutang"

$K_d$  :Biaya "hutang"

B :Nilai "pasar" hutang"

S :Nilai "modal" sendiri"

Dalam rumus tersebut, MM mengabaikan kebermaknaan pendanaan dengan tidak mempertimbangkan faktor pajak. Mereka yakin bahwa peningkatan nilai perusahaan yang menggunakan utang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan utang, karena pengurangan beban pajak. Meski demikian dalam kondisi pasar saat ini, tidak dapat dipungkiri jika beban pajak dapat mempengaruhi kondisi keuangan yang mana pajak tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan dan butuh dipertimbangkan pada saat menentukan struktur modal perusahaan.

#### 4. *Asymmetric Information Theory*

Teori ini mengacu pada informasi terkait persepek perusahaan yang diterima oleh pihak internal perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan investor perusahaan. Keadaan tersebut yang dapat membuat perusahaan cenderung mempertahankan hutang demi memperoleh untung dalam kesempatan untuk berinvestasi tanpa perlu mengeluarkan saham baru ketika nilainya menurun yang diakibatkan *bad signaling*.

### 6.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal

Manajer keuangan menghadapi tantangan yang kompleks ketika harus membuat keputusan tentang struktur modal, karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang signifikan. Menurut (Susanti and Agustin, 2015) faktor pengambilan keputusan dalam menentukan struktur yaitu sebagai berikut:

### 1. Pertumbuhan Aset

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan aset yang cepat cenderung lebih banyak memanfaatkan hutang. Penggunaan sumber dana hutang yang lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri membuat perusahaan lebih meyakinkan pihak luar dengan adanya dana yang ditanamkan ke dalam perusahaan dijamin oleh pertumbuhan aset yang besar.

### 2. Profitabilitas

Profitabilitas merujuk pada kapasitas perusahaan untuk mencapai keuntungan. Rasio-rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur hal ini, seperti yang tercantum berikut:

- a. Margin Laba Bersih merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan bersih dari tingkat penjualan tertentu dengan membandingkan laba bersih dengan pendapatan penjualan.
- b. *Return on Equity* (ROE) adalah kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba bersih dari modal internal dapat diukur dengan membandingkan rasio antara laba bersih dan modal sendiri.
- c. *Return on Assets* (ROA) adalah Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh asetnya diukur dengan cara membandingkan laba bersih yang dihasilkan dengan total aset yang dimiliki.

### 3. Pertumbuhan Penjualan

Peningkatan penjualan pada setiap periode menggambarkan penjualan yang relatif stabil dan aman. Pertumbuhan penjualan yang meningkat dapat meningkatkan dana untuk pembiayaan ekspansi. Dengan demikian manajemen terkadang mengambil langkah dengan mengurangi pembagian laba kepada pemegang sahamnya.

### 4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan saat menentukan struktur modal. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula jumlah dana yang diperlukan, dan sebaliknya, semakin kecil perusahaan, semakin sedikit juga dana yang diperlukan.

## 6.3 Arus Kas

Modal yang keluar untuk digunakan dalam Investasikan atau yang masuk karena diperoleh kembali, semua ditetapkan melalui arus kas. Arus kas tersebut dapat ditelusuri dari pos investasi. Waktu dan jumlah yang dibutuhkan dalam arus kas harus direncanakan secara tepat saat keputusan investasi tersebut diambil. Perencanaan besaran arus kas setiap periodenya berupa langkah awal dalam menilai profitabilitas usulan investasi. Menurut (Susanti *et al.*, no date) menjelaskan bahwa cara yang biasa dipakai dalam untuk penentuan arus kas adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian rugi laba atas dengan cara menambahkan biaya penyusutan. Rumus yang digunakan adalah: Arus kas masuk = EAT (*earning after tax*) + penyusutan
2. Pemisahan antara pembayaran bunga dengan penghasilan, pengeluaran biaya tunai dan pajak
3. Arus kas masuk = EAT + penyusutan + bunga(1-pajak).

## 6.4 Keputusan Investasi

Keputusan keuangan yang diambil oleh manajer melibatkan pemilihan jenis dan struktur dari sumber pendanaan yang digunakan. Sehingga manajer keuangan tersebut dapat memutuskan pendanaan mana yang akan digunakan dalam berinvestasi, apakah itu dana yang berasal dari sumber internal, atau sumber eksternal, atau besarnya hutang dan modal sendiri yang digunakan.

Adapun kriteria-kriteria dalam mengambil keputusan investasi (*Investment Decision Criteria*) menurut (P. Keown, Martin, 2011):

Macam-macam investasi modal proyek:

- a. *Revenue Enhancement Investments*, mengacu pada perolehan keuntungan yang tinggi, tidak jarang ekspansi dari bisnis yang sudah berjalan juga terlibat dalam investasi ini
- b. *Cost Reduction Investments*, terjadi karena peralatan dan mesin yang gunakan telah usang sehingga perlu ada pengembangan peralatan baru dan yang lebih baik karena yang lama tidak digunakan, hal ini berlawanan dengan prinsip *capital expenditures* dimana perusahaan meminimalkan biaya dalam kegiatan operasinya

- c. *Mandatory Investments*, perusahaan berkesinambungan melakukan *capital investments* dalam memenuhi aturan keamanan dan lingkungan sekitar.

Jenis kriteria Investasi:

- a. NPV (*Net Present Value*), perbandingan antara nilai arus kas saat ini dan arus kas yang dikeluarkan. NPV memiliki kemampuan untuk memperkirakan total keuntungan yang dihasilkan oleh suatu proyek. Ini memungkinkan manajer untuk menilai apakah suatu proyek layak dilaksanakan karena keuntungannya melebihi biaya yang dikeluarkan. Kriteria penilaian proyek akan menyetujui jika NPV dari proyek tersebut adalah positif, namun akan menolaknya jika NPV dari proyek tersebut bernilai negatif.
- b. PI (*Profitability Index*), merupakan perbandingan antara nilai arus kas masa depan dengan biaya awal disebut sebagai Rasio Manfaat Biaya. Keputusan dibuat berdasarkan indikator PI, dimana jika  $PI=1$  atau  $PI>1$ , maka nilai sekarang bersih (NPV) akan positif, dan proyek dapat disetujui. Sebaliknya, jika  $PI<1$ , NPV akan negatif, dan proyek perlu ditolak.
- c. IRR (*Internal Rate of Return*), adalah tingkat diskonto yang menghasilkan  $NPV=0$ . Untuk menerima proyek, IRR harus melebihi tingkat pengembalian yang diharapkan, sedangkan jika tingkat pengembalian yang diinginkan lebih tinggi daripada tingkat pengembalian internal (IRR), maka proyek tersebut akan tidak disetujui.
- d. *Payback Period* merupakan jangka waktu yang diperlukan bagi suatu proyek untuk mendapatkan pengembalian investasi yang telah diusahakan pada tahap awal. Keputusan diterima atau ditolaknya proyek bergantung pada seberapa cepat *Payback Period* tersebut dibandingkan dengan standar waktu yang telah ditetapkan perusahaan; proyek akan diterima jika waktu pengembalian lebih pendek dari yang sudah dijadwalkan., namun akan ditolak jika periode pengembaliannya lebih lama dari standar yang ditetapkan.

## 6.5 Portofolio

Portofolio adalah kumpulan dari beberapa investasi. Portofolio tersebut berupa aset riil dan aset keuangan seperti Saham, Reksadana, Obligasi, dan Waran. Portofolio yang optimal adalah portofolio yang efisien, yaitu mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi sambil meminimalkan risiko yang terkait.

### 6.5.1 Saham

Saham adalah tanda atau bukti bahwa seseorang atau suatu entitas memiliki bagian dari suatu perusahaan. Pemegang saham tersebut biasa disebut dengan *shareholder* atau *stockholder*. Bukti dari kepemilikan tersebut ditandai dengan tercatatnya seorang *stockholder* dalam daftar pemegang saham (DPS) yang dimiliki perusahaan. Para *stockholder* nantinya juga akan diundang pada setiap agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa melihat dari persentase kepemilikannya.

Kepemilikan saham akan mendapatkan manfaat berupa deviden yang merupakan bagian atas keuntungan yang dibagikan kepada para *stockholder*. Besaran deviden yang diterima oleh *stockholder* akan diusulkan oleh Dewan Direksi pada RUPS. Deviden yang dibagikan bisa berupa deviden tunai atau dalam bentuk sejumlah uang dan deviden saham atau dalam bentuk saham baru. Selain mendapatkan keuntungan deviden, *stockholder* juga bisa mendapatkan manfaat lain yaitu *Capital Gain (Loss)* adalah perbedaan antara nilai penjualan dan nilai pembelian saham. Jika harga penjualan melebihi harga pembelian saham, itu dianggap sebagai *Capital Gain*, sementara jika harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian saham, hal tersebut disebut sebagai *Capital Loss*.

Jenis saham dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Saham biasa (*common stock*) merupakan saham yang tidak memiliki hak istimewa dalam prioritas menerima deviden. Bahkan pemegang saham bias ini memiliki risiko akan menanggung kerugian atas investasinya kepada perusahaan jika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.
2. Saham preferen (*preferred stock*) berbeda dengan saham biasa dimana pemilik saham preferen memiliki hak istimewa yaitu diprioritaskan dalam pembagian deviden dan memiliki hak untuk klaim investasinya jika perusahaan mengalami kebangkrutan.

### 6.5.2 Reksadana

Reksadana (*Mutual Fund*) merupakan bukti kepemilikan yang berupa sertifikat didalamnya menjelaskan bahwa pemilik sertifikat tersebut menitipkan sejumlah uang kepada pengelola reksadana. Pengelola reksadana itu sendiri biasa disebut dengan manajer investasi. Oleh manajer investasi dana yang dititipkan tersebut digunakan sebagai modal dalam melakukan penanaman modal baik di sektor keuangan maupun di pasar investasi.

Membeli reksadana hampir sama dengan menabung, namun surat tanda reksadana ini bisa diperjual belikan tidak seperti menabung biasa. Ada beberapa kelebihan yang akan diperoleh jika berinvestasi dalam bentuk reksadana, yaitu sebagai berikut:

1. Dikelola secara efektif dan efisien karena dikelola oleh para profesional dalam pasar modal. Para profesional ini juga memiliki akses informasi perdagangan efek. Sehingga dapat menganalisis peluang investasi terbaik untuk para nasabahnya
2. Akses investasi yang terbilang mudah, karena pada reksadana ini investor diberikan pilihan pemaparan mengenai strategi, risiko, serta keuntungan yang diharapkan
3. Investor lebih bebas untuk memilih suatu jenis investasi bahkan bebas juga jika ingin berpindah ke jenis investasi lainnya
4. Biaya yang relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan investor yang melakukan sendiri.

### 6.5.3 Obligasi

Obligasi merupakan surat berharga yang mana didalamnya berisikan kontrak antara kedua belah pihak yaitu peminjam (emitmen) dan pemberi pinjaman (investor). Keuntungan yang diperoleh dari obligasi adalah kupon dan *capital gain*. Obligasi juga dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder, memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh apresiasi modal (*capital gain*).

Umumnya, peluang untuk mendapatkan keuntungan modal terjadi dengan menjual obligasi di Pasar Sekunder sebelum masa jatuh tempo tiba. Selain dari Pasar Sekunder *capital gain* juga dapat diperoleh dari diskon pada saat pembelian obligasi, dalam artian harga yang diperoleh nilainya berada di bawah jumlah yang tertera, akan tetapi ketika jatuh tempo tiba, para

investor akan mendapatkan pembayaran sebesar nilai yang tertera pada nominalnya. Namun yang perlu diingat bahwa setiap investasi akan ada risiko yang ditanggung. Risiko dalam obligasi ini biasa disebut dengan *capital loss*. Risiko tersebut timbul akibat gagal bayar atau obligasi tersebut diperjual belikan lagi sebelum batas jatuh tempo saat harga belinya lebih rendah dari harga ketika menjual.

Obligasi sendiri dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Obligasi Korporasi merupakan obligasi yang diterbitkan perusahaan.
2. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah disebut sebagai Obligasi Pemerintah.
3. Obligasi Daerah adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pendanaan suatu proyek lokal.

#### **6.5.4 Waran**

Waran adalah suatu alternatif yang membuat pemilik mempunyai pilihan atas waran tersebut akan ditukarkan ataukah tidak jika saatnya jatuh tempo. Warannya bisa ditukar dalam jangka waktu enam bulan setelah diterbitkan oleh perusahaan. Untuk harga waran itu secara khusus relative dibawah harga saham, namun tetap berfluktuasi selama periode perdagangannya.

### **6.6 Pasar Modal**

Pasar modal merupakan wadah transaksi jual beli sekuritas yang diterbitkan oleh suatu Lembaga ataupun profesi terkait lainnya. Dalam pasar modal di Indonesia, semua perusahaan yang terdaftar didalamnya wajib untuk menyajikan informasi secara transparan kepada masyarakat, baik itu mengenai profil perusahaan, produk, bahkan hingga laporan keuangannya. Informasi tersebut biasanya dapat di unduh melalui *website* perusahaan atau *website* pasar modal Indonesia berupa *Annual Report*.

Kondisi pasar modal Indonesia yang dinamis menuntut para investor untuk dapat responsive terhadap perubahan informasi. Dengan karakter investor yang berbeda-beda dari segi motivasi, daya beli, dan pengalaman mengakibatkan adanya perbedaan tingkat keyakinan akan *return* dan risiko yang diperoleh.

## 6.7 Return dan Risiko Portofolio

### 6.7.1 Return dalam Investasi

*Return* dalam investasi adalah manfaat atau profit yang dapat diperoleh oleh seorang investor dari investasi yang ia lakukan. Return tersebut berasal dari dua sumber yaitu:

1. *Yield* merupakan keuntungan dasar yang berupa arus kas yang diperoleh secara periodik yang biasa disebut dengan deviden.
2. *Capital Gains/loss* adalah keuntungan yang diperoleh berdasarkan perubahan harga aset yang dipegang. Perubahan tersebut bisa positif (*gain*) atau negatif (*loss*).

### 6.7.2 Risiko dalam Investasi

Risiko merupakan kemungkinan akan adanya ketidakberuntungan atau hal yang merugikan. Ada beberapa konsep yang mendasari terjadinya risiko yaitu sebagai berikut:

1. Risiko murni adalah kemungkinan yang dapat menimbulkan rugi. Risiko ini dibagi lagi menjadi tiga tipe sebagai berikut:
  - a. Risiko aset fisik timbulnya kerugian dari segi aset fisik suatu perusahaan/organisasi. Misalnya, bencana alam, kebakaran, dan kondisi alam lainnya yang tidak dapat dihindari.
  - b. Risiko karyawan timbul oleh sesuatu yang dialami oleh karyawan disuatu perusahaan/organisasi seperti insiden di tempat kerja yang mengakibatkan gangguan dalam menjalankan operasional perusahaan.
  - c. Risiko legal timbul karena adanya perjanjian yang tidak berhasil dilaksanakan sebagai mana mestinya.
2. Risiko spekulatif adalah ketidakpastian yang menyebabkan terjadinya untung dan rugi. Spekulasi ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Risiko pasar adalah risiko atas pergerakan turun dan naiknya aset investasi pada pasar.
  - b. Risiko kredit merupakan risiko atas kegagalan suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan seperti kredit macet.

- c. Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul karena tidak mempunya sebuah perusahaan dalam mengatasi kebutuhan kasnya.”
  - d. Risiko operasional merupakan risiko atas adanya kegiatan operasional yang tidak berjalan sebagaimana mana mestinya.
3. Risiko subyektif merupakan risiko yang ada kaitannya dengan kondisi mental seorang investor.
  4. Risiko objektif merupakan risiko atas perbedaan capaian dari yang diharapkan berdasarkan pengalaman.

# Bab 7

## Pajak dan Akuntansi Pajak

### 7.1 Konsep Dasar Pajak

Pengertian untuk membahas konsep pajak, berbagai ahli telah memberikan definisinya. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak merupakan kontribusi yang dikenakan kepada warga negara sesuai peraturan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan atau pelayanan yang dapat dikembalikan. Dana tersebut dipakai untuk menopang biaya-biaya umum pemerintah. Profesor Edwin R. A. Seligman mengartikan pajak sebagai pembayaran yang harus diberikan oleh individu kepada pemerintah guna menutup pengeluaran dalam kepentingan bersama, tanpa mempertimbangkan manfaat spesifik yang diterima.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Aturan Umum dan Prosedur Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang harus diberikan kepada negara oleh seseorang atau perusahaan sesuai dengan hukum, tanpa imbalan langsung, dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri seperti yang berikut ini:

1. Pajak adalah aliran uang dari masyarakat ke kas negara.
2. Pungutan pajak dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan bisa diambil secara tidak sukarela.
3. Tidak ada imbalan spesifik atau tanggapan yang bisa diperlihatkan.
4. Penggunaan pajak bertujuan untuk mendukung pengeluaran publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-prinsip pajak meliputi:

1. Prinsip Legitimasi Pengenaan Pajak oleh Negara (Rechtsfilosofis).
2. Prinsip Pengenaan Pajak.
3. Prinsip Pungutan Pajak.
4. Prinsip Pembagian Beban Pajak.
5. Prinsip dalam Pembuatan UU Pajak.

Fungsi Pajak memiliki dua fungsi utama menurut (Suci, Karamoy and Rondonuwu, 2019), yaitu fungsi anggaran dan fungsi regulasi seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. Fungsi Anggaran: Pajak digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk mengisi kas negara dengan tujuan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Regulasi: Penggunaan pajak sebagai sarana pengendalian dalam berbagai bidang, entah itu ekonomi, sosial, atau politik, dimaksudkan untuk mencapai tujuan spesifik. Ini bisa termasuk insentif pajak, pengenaan pajak ekspor, dan pengenaan pajak impor untuk melindungi industri dalam negeri.

Berbagai jenis pajak dapat ditemukan dalam berbagai referensi literatur mengenai keuangan pemerintah dan pengenalan dasar hukum perpajakan. Pengelompokan pajak berbeda-beda berdasarkan beberapa faktor, seperti pelaku yang membayar pajak, kemampuan untuk memindahkan beban pajak, orang atau entitas yang mengumpulkan pajak, serta karakteristik dari pajak itu sendiri. Pembagian jenis-jenis pajak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut (Priantara, 2012).

1. Menurut Golongan:
  - a. Pajak Langsung: Pajak Langsung merujuk pada kewajiban pajak yang secara langsung dikenakan kepada individu atau entitas yang wajib membayar, dimana pajak tersebut tidak bisa dipindahkan ke orang atau pihak lain. Salah satu contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung mengacu pada jenis pajak di mana beban pajak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Beberapa contoh meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah. Dalam jenis pajak ini, pertama-tama dikenakan kepada wajib pajak, yaitu pengusaha yang terkena pajak, tetapi beban pajaknya

akhirnya dibebankan kepada orang yang memanfaatkan layanan atau barang yang diproduksi oleh pelaku usaha tersebut.

2. Menurut Sifat:
  - a. Pajak Subjektif: Pajak di mana subjek pajaknya menjadi perhatian utama pada saat pengenaannya. Setelah subjek pajaknya diketahui, baru ditentukan objek pajaknya. Contohnya adalah PPh.
  - b. Pajak Objektif: Pajak di mana objek pajaknya menjadi perhatian utama pada saat pengenaannya. Setelah objek pajaknya diketahui, baru ditentukan subjek pajaknya. Sebagai contoh, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungutan:
  - a. Ada dua klasifikasi utama yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan pajak: Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Departemen Keuangan mengelola pajak federal melalui Direktorat Jenderal Pajak, yang melibatkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bagian integralnya.
  - b. Pajak yang dikelola oleh pemerintah setempat terbagi menjadi dua tingkatan utama, yakni Pajak Provinsi meliputi berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan, pajak bahan bakar, serta pajak atas pengambilan dan penggunaan air di bawah tanah dan permukaan tanah. Di sisi lain, Pajak Kabupaten/Kota mencakup pajak-pajak seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, serta pajak atas pengambilan dan pengolahan bahan golongan C.

## 7.2 Ketentuan Tata Cara Perpajakan

Hukum tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pajak adalah hasil dari prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi 1945, yang menunjukkan perlunya menghargai hak-hak individu sambil menegaskan tanggung jawab warga negara untuk membayar pajak sebagai bagian integral dari kewajiban kepada negara.

NPWP merupakan kode identifikasi diberikan dokumen tersebut untuk tujuan administrasi perpajakan, yang berfungsi sebagai identifikasi saat wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam konteks perpajakan. Fungsi NPWP adalah sebagai berikut:

1. Sebagai cara untuk mengenali diri atau identitas yang harus disampaikan oleh wajib pajak.
2. NPWP memiliki peran dalam menjaga keteraturan pembayaran pajak dan mengawasi pengelolaan administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2011).
3. Dokumen perpajakan memerlukan NPWP karena aturan mengharuskan keberadaan NPWP di dalam dokumen-dokumen tersebut.
4. Agar patuh pada kewajiban pajak, termasuk dalam pengisian Setoran Pajak (SSP) yang memerlukan penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Dalam mengajukan dokumen-dokumen ke instansi yang berwenang, persyaratan layanan mengharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada dokumen-dokumen tersebut, seperti pada dokumen impor (PIB) atau dokumen ekspor (PEB).
6. Dimanfaatkan untuk mengirimkan notifikasi tentang Surat Pemberitahuan (SPT) berkala setiap masa atau tahun (Marsyahrul, 2005).

SPT adalah dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memberikan informasi tentang perhitungan dan/atau pembayaran pajak, serta untuk melaporkan objek pajak, non-objek pajak, aset, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan. Terdapat dua jenis SPT:

1. SPT Masa adalah formulir yang dipergunakan untuk mengirimkan laporan pajak dalam rentang waktu tertentu pada periode pajak yang spesifik.
2. SPT Tahunan adalah formulir yang digunakan untuk mengungkapkan informasi perpajakan selama satu tahun pajak atau periode tertentu dalam tahun pajak.

Peraturan mengenai Pengiriman SPT. WP dapat melakukan pengiriman SPT, sebagai berikut:

1. Dapat mengantarkan secara langsung ke kantor pajak yang dituju, seperti KPP/KP2KP, atau mengirimkan ke lokasi yang telah ditentukan, seperti Drop Box, Pojok Pajak, atau Mobil Pajak Keliling.
2. Mengirim surat melalui jasa pengiriman pos, atau
3. Dengan cara lain, seperti memanfaatkan jasa perusahaan pengiriman atau kurir yang menyediakan bukti pengiriman surat atau menggunakan e-Filing melalui penyedia layanan aplikasi (ASP).

Bukti bahwa SPT telah diterima setelah disampaikan:

1. Mendapatkan surat secara langsung merupakan tanda bahwa surat tersebut telah diterima dengan konfirmasi.
2. Melakukan E-Filing melalui ASP menunjukkan bahwa dokumen telah diterima secara elektronik.
3. Mengirim surat melalui pos dengan tanda bukti pengiriman merupakan bukti resmi bahwa surat tersebut telah dikirim.
4. Menggunakan jasa perusahaan ekspedisi atau layanan kurir juga dapat dianggap sebagai konfirmasi bahwa surat tersebut telah diterima.

Jika SPT tidak disampaikan atau disampaikan setelah batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan besaran sebagai berikut:

- a. Sanksi administratif untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi adalah sebesar Rp 100 ribu.
- b. Sanksi administratif untuk SPT Tahunan PPh badan adalah sebesar Rp 1 juta.
- c. Sanksi administratif untuk SPT Masa PPh adalah sebesar Rp 500 ribu.
- d. Sanksi administratif untuk SPT Masa Lainnya adalah sebesar Rp 100 ribu.

Berikut ini adalah beberapa jenis ketetapan pajak:

- a. Dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) mengindikasikan jumlah pajak asli yang harus dibayarkan, kredit pajak, defisit pembayaran pajak pokok, denda administratif, dan total pajak yang perlu diselesaikan.
- b. Dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan suatu lembaran kertas yang mencatat

- penambahan jumlah pajak dari nilai yang sebelumnya telah ditetapkan.
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah dokumen yang memperlihatkan kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar atau mungkin sebenarnya tidak perlu dibayarkan.
  - d. SKPN merupakan dokumen yang menegaskan bahwa jumlah pembayaran pajak sama dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada tunggakan pajak serta kredit pajak yang belum terpakai.

## 7.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan kewajiban pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun fiskal. Individu atau entitas yang menerima pendapatan akan menjadi Wajib Pajak asalkan mereka memperoleh penghasilan. Dalam lingkup regulasi perpajakan Indonesia, istilah "Wajib Pajak" mengacu pada entitas perorangan maupun badan hukum yang ditetapkan secara subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perpajakan. Mereka harus membayar pajak atas pendapatan yang diterima dalam satu tahun pajak atau pada bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir pada periode tersebut. Menurut peraturan perpajakan di Indonesia, tahun pajak biasanya mengacu pada tahun kalender, meskipun para Wajib Pajak memiliki opsi untuk memilih tahun buku yang berbeda dengan rentang waktu 12 bulan untuk menghitung pajak mereka.

Pajak Penghasilan mencakup semua pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik itu bertambahnya keuangan dari dalam maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk kebutuhan konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dalam beragam cara.

Tetapi, beberapa bentuk pendapatan tidak termasuk dalam kategori Objek Pajak Penghasilan, seperti:

- a. Bantuan atau donasi, seperti zakat dan kontribusi agama lain yang diatur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Hibah yang sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan akan dianggap sebagai penghasilan jika tidak terhubung dengan kegiatan bisnis, pekerjaan, kepemilikan, atau kendali yang terjadi di antara para pihak yang terlibat dalam pembagian warisan,

penggantian, atau imbalan atas barang atau layanan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. Aturan ini berlaku ketika hibah diberikan oleh pihak yang bukan termasuk Wajib Pajak atau kategori Wajib Pajak khusus.

- c. Pendapatan tambahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam regulasi perpajakan.

Penghasilan bersih yang tidak dikenai pajak untuk Wajib Pajak perorangan diatur sesuai dengan PTKP sebagai berikut:

- a. Sejumlah uang sebesar 54 juta rupiah harus dibayarkan oleh seorang wajib pajak.
- b. Penambahan sejumlah uang sebesar Rp4.500.000,00 untuk Wajib Pajak yang telah melakukan pernikahan.
- c. Peningkatan sejumlah uang sebesar Rp54.000.000,00 diberikan kepada istri yang mengkombinasikan penghasilannya dengan suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1).
- d. Peningkatan sebesar Rp4.500.000,00 diberikan kepada setiap individu yang termasuk dalam keluarga biologis, keluarga yang diikat oleh hubungan darah, dan anak-anak yang diadopsi, semuanya menjadi fokus utama dalam tanggung jawab, dengan jumlah maksimum tiga orang untuk setiap keluarga.

### **7.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan merupakan kewajiban pembayaran pajak yang diberlakukan pada perorangan atau badan usaha yang menerima pendapatan dalam jangka waktu satu tahun pajak. Seseorang atau entitas bisnis, yang diidentifikasi sebagai subjek yang harus membayar pajak sesuai dengan UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh), akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Jika kewajiban pajak dimulai atau selesai dalam satu tahun pajak, pendapatan yang diperoleh pada rentang waktu tersebut juga dapat dikenai pajak.

Pajak penghasilan, seperti yang diatur dalam Pasal 21, merupakan jenis kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perorangan. atau entitas yang menerimanya dan tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain. Hal ini mengakibatkan kewajiban pajak yang melekat pada subjek yang melakukan pembayaran. Menentukan periode dimulainya dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif memiliki signifikansi besar dalam memberikan

kepastian hukum. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara spesifik terhadap pendapatan meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta bentuk pembayaran lain yang diperoleh oleh individu yang wajib membayar pajak di dalam negeri sebagai imbalan dari pekerjaan, layanan, atau aktivitas yang mereka lakukan (Devina and Waluyo, 2016).

Rumus tarif PPh 21:

$$\text{PPh 21} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{Penghasilan} - \text{Pengurang})$$

Biaya pajak yang dikenakan pada PPh 21 adalah tingkat tarif pajak yang diuraikan dalam Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali jika ada peraturan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah. Biaya yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan skema perpajakan yang naik sejalan dengan kenaikan pendapatan.

**Tabel 7. 1:** Tarif yang ditetapkan pada UU PPh Pasal

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif UU PPh Pasal 17
s.d. Rp 50 Juta	5%
Diatas Rp 50 Juta - 250 Juta	15%
Diatas Rp 250 Juta - 500 Juta	25%
Diatas Rp 500 Juta	30%

Sumber: (Kemenkeu, 2023)

### 7.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan tindakan pengurangan atau pengenaan pajak yang dikerjakan oleh entitas lain sesuai dengan Undang-Undang Pajak terhadap individu yang terlibat dalam transaksi jual-beli barang. Umumnya, PPh Pasal 22 berlaku pada transaksi jual-beli barang yang menghasilkan profit, sehingga baik penjual maupun pembeli yang meraup keuntungan dapat dikenai PPh Pasal 22.

Pajak yang dipungut sesuai dengan Pasal 22 bisa dianggap sebagai kredit pajak bagi wajib pajak yang dipungut, yang berarti bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan dapat dianggap sebagai pembayaran di muka. Tetapi, pembayaran untuk PPh Pasal 22 yang merupakan pembayaran pajak akhir, tidak dapat diakumulasikan pada akhir periode pajak, karena tidak dapat dijadikan pengurang. Pemotongan dan pemungutan pajak ini dilakukan setiap bulan atau akhir bulan, dan jika terdapat transaksi yang memenuhi syarat, pada akhir tahun, wajib pajak bisa memanfaatkannya sebagai potongan dalam perhitungan pajak penghasilan..

Tarif pajak yang besar berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010 Tahun 2017 adalah seperti yang berikut ini:

- a. Pengenaan pajak sebesar 2,5% dan 7,5% berlaku untuk barang-barang yang diimpor.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22 diberlakukan pada tingkat 1,5% dari total nilai transaksi pembelian.
- c. Biaya pajak penghasilan 22 untuk penjualan produk tertentu.
- d. Biaya pajak penghasilan untuk barang-barang hasil produksi Migas.
- e. Pajak Pasal 22 dikenakan dengan tingkat tarif sebesar 0,25% pada pembelian bahan yang digunakan untuk keperluan industri.
- f. Pengenaan pajak sebesar 0,5% dari nilai barang impor dilakukan dalam bentuk Pajak Penghasilan Pasal 22.
- g. Pengiriman komoditas tambang yang dilakukan ke luar negeri akan dikenai biaya pajak penghasilan sebesar 1,5% berdasarkan Pasal 22.
- h. Pajak sebesar 0,45% dari nilai transaksi penjualan kendaraan bermotor akan dikenakan berdasarkan Pasal 22 dalam undang-undang pajak penghasilan.
- i. Pajak sebesar 0,45% dikenakan pada penjualan emas batangan sesuai dengan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22.
- j. Pajak penghasilan Pasal 22 untuk barang-barang mewah dikenakan dengan tarif sebesar 1% dan 5%.

### **7.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 23**

PPh pasal 23 adalah pengurangan pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima oleh seseorang yang diwajibkan membayar pajak di negara tersebut, baik itu berasal dari kegiatan usaha tetap maupun bukan. Ketentuan PPh pasal 23 diberlakukan untuk Pendapatan yang diperoleh dari penanaman modal, penyediaan layanan, atau pelaksanaan aktivitas tertentu, yang tidak masuk dalam kategori pajak penghasilan Pasal 21 yang umumnya dikenakan oleh instansi pemerintah atau wajib pajak di dalam negeri, seperti kegiatan operasional, kehadiran usaha tetap, atau perwakilan perusahaan asing lain. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak Subjektif di mana penerapannya bergantung pada subjek pajak yang telah memenuhi

syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi perpajakan. Artinya, jika tidak ada subjek pajak, tidak akan ada kewajiban untuk membayar pajak penghasilan, menunjukkan kejelasan dalam hal ini.

Rumus PPh 23:

$$\text{PPh 23} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan}$$

Pendapatan yang termasuk dalam subjek PPh 23 memiliki dua tingkatan tarif pajak, yaitu 15% dan 2%, yang diterapkan sesuai dengan jenis kategori pendapatan yang bersangkutan.

**Tabel 7. 2:** Tarif PPh Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif
Pendapatan yang berkaitan dengan investasi modal.	15%
Pendapatan terkait dengan menyewa dan memanfaatkan aset.	2%
Pendapatan yang terkait dengan bayaran untuk pelayanan yang diberikan.	2%
Pendapatan dari layanan kompensasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.	2%

(Sumber: (Kemenkeu, 2023))

### 7.3.4 Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Pasal 24 merupakan tanggung jawab pajak yang diberlakukan pada pendapatan yang diperoleh dari luar negeri atau diterima dari luar negeri. Pajak ini kemudian bisa digunakan sebagai kredit untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan atas semua pendapatan yang diterima oleh individu wajib pajak di wilayah negara. Pengkreditan pajak Pasal 24 ini hanya bisa dilakukan jika pajak tersebut datang dari sumber pendapatan yang identik. Sebagai contoh, dalam hal pajak dividen saham, kredit pajak hanya dapat diberikan jika pajak tersebut sudah dipotong oleh Negara yang menerbitkan saham tersebut.

Pedoman utama Pajak Penghasilan Pasal 24 mengatur batas dalam perhitungan jumlah kredit pajak yang dapat dipakai untuk mengurangi pajak yang harus dibayar atau pajak yang telah dilunasi di negara lain. Aturan ini berada sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam paragraf 1 dan 2 Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan:

- a. Penerimaan pendapatan dari luar negeri oleh Wajib Pajak di dalam negeri dapat dianggap sebagai pengurangan pajak yang

harus dibayarkan sesuai dengan peraturan yang sama dalam periode pajak yang bersamaan (UU Pajak Penghasilan Pasal 24). Hal ini terkait dengan pembayaran pajak yang sudah dilakukan atau belum dilunasi di luar negeri.

- b. Jumlah manfaat pajak yang bisa didapatkan sebagaimana dijelaskan pada ayat pertama tidak dapat melampaui jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan peraturan ini. Orang-orang yang wajib membayar pajak sesuai dengan PPh Pasal 24 adalah penduduk Indonesia yang diharuskan membayar pajak atas semua pendapatan mereka, termasuk yang diperoleh dari luar negeri.

Di bawah ini adalah rincian sumber penghasilan dari luar negeri yang bisa dihitung sebagai kredit pajak:

- a. Pendapatan yang diperoleh dari saham dan berbagai alat keuangan, juga keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham dan alat keuangan tersebut, berasal dari wilayah negara di mana perusahaan yang menerbitkan saham atau alat keuangan tersebut beroperasi atau berkantor.
- b. Pendapatan yang berasal dari bunga, royalti, dan biaya sewa terkait dengan pemanfaatan aset bergerak diperoleh dari negara di mana individu atau entitas yang menjalankannya berada, pembayaran atau menanggung biaya tersebut berada atau berkantor.
- c. Pendapatan sewa yang diterima terkait dengan pemanfaatan aset tetap berasal dari wilayah tempat aset tersebut berada.
- d. Pendapatan yang diterima dari layanan, pekerjaan, dan aktivitas bergantung pada lokasi atau kantor dari pihak yang membayar atau dikenai pajak atas pendapatan tersebut di negara tersebut.
- e. Pendapatan perusahaan selalu berasal dari daerah tertentu di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan operasionalnya.
- f. Pendapatan yang diperoleh dari mengalihkan sebagian atau seluruh hak penambangan, atau berpartisipasi dalam pembiayaan atau investasi dalam perusahaan pertambangan di negara di mana lokasi penambangan tersebut berada.

- g. Pendapatan dari penjualan properti tetap diperoleh dari lokasi properti tersebut.
- h. Keuntungan dari penjualan aset yang merupakan bagian integral dari entitas bisnis diperoleh dari wilayah di mana entitas usaha tetap tersebut berlokasi.

### 7.3.5 Pajak Penghasilan Pasal 25

Ketentuan dalam undang-undang perpajakan memastikan pada Pasal 25 bahwa wajib pajak dibayar secara individu setiap bulan sepanjang tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini, terdapat perhitungan kewajiban membayar angsuran pajak pendapatan sesuai Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya yang harus dipatuhi oleh individu yang membayar pajak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Tabel 7. 3:** Perhitungan PPh Pasal 25

PPh menurut SPT Tahun PPh tahun lalu		xxx
Pengurangan/Kredit Pajak:		
PPh Pasal 21	xxx	
PPh Pasal 22	xxx	
PPh Pasal 23	xxx	
PPh Pasal 24	<u>xxx</u>	
Total kredit pajak		<u>xxx</u>
Dasar Perhitungan angsuran		<u>xxx</u>
Angsuran PPh 25 = dasar perhitungan angsuran: 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak		

(Sumber: (Kemenkeu, 2023))

Selain itu, dalam peraturan yang terdapat di pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Penghasil juga menjelaskan bahwa usaha Wajib Pajak akan tetap stabil atau tidak akan mengalami perubahan di tahun berikutnya. Namun, jika usaha Wajib Pajak mengalami signifikansi perubahan, maka besaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah dihitung sebelumnya menjadi tidak relevan.

Terdapat dua metode pembayaran cicilan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang berlaku untuk individu yang wajib membayar pajak:

1. Pembayaran pajak penghasilan Pasal 25 berlaku bagi individu yang merupakan karyawan atau pekerja lepas dan tidak memiliki usaha pribadi. Pajak yang wajib dibayarkan oleh orang tersebut dihitung dengan mengalikan pendapatan diberlakukan pajak

penghasilan (PKP) pada tingkat tarif PPh 17 ayat (1) bagian a selama periode 12 bulan.

2. Pembayaran pajak penghasilan Pasal 25 untuk individu yang menjalankan bisnis tertentu: Berlaku bagi individu yang memiliki setidaknya satu tempat usaha dan terlibat dalam penjualan barang baik dalam skala besar maupun kecil, dan pelayanan jasa. Jumlah pajak penghasilan individu harus membayar sebesar 0,75% dari penghasilan bulanan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 yang diperoleh dari setiap tempat usaha yang dimiliki.

Tarif Pajak Penghasilan 17 ayat (1) huruf a yang diatur oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Rp 50.000.000 = 5%
- b. Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
- c. Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%
- d. Di atas Rp 500.000.000 = 30%

Bagi perusahaan yang membayar pajak, besarnya pembayaran yang harus dilakukan untuk angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif 25% sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Langkah awal dalam menentukan jumlah angsuran yang harus dibayarkan untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah menyelesaikan semua catatan keuangan untuk setiap akhir periode fiskal. Setelah itu, jumlah angsuran yang harus disetor akan dihitung dengan mengurangi pajak penghasilan yang diperlukan seperti berikut ini:

- a. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bervariasi tergantung pada kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP.
- b. Tindakan pengenaan biaya sebesar 100% akan diberlakukan pada orang atau badan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- c. Pajak Pasal 23 dikenakan pada sejumlah pendapatan seperti hadiah, royalti, bunga, dividen, sewa, dan penghasilan lainnya. Pajak ini berupa potongan sebesar 15% dari hadiah, royalti,

- bunga, dan dividen, serta potongan sebesar 2% dari pendapatan sewa dan jasa lain yang diterima.
- d. Pajak penghasilan Pasal 24 merujuk kepada pembayaran atau kewajiban pembayaran pajak penghasilan dari luar negeri yang dapat diakui dan diberikan kredit.

### **7.3.6 Pajak Penghasilan Pasal 26**

Pajak Pasal 26 merupakan tanggung jawab pajak yang harus dibayarkan atau dipotong dari individu atau entitas pajak yang beroperasi di luar negeri atas pendapatan yang didapat dari Indonesia, kecuali jika pendapatan tersebut berasal dari kegiatan usaha yang secara konsisten dilakukan di Indonesia.

Subyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 mencakup individu-individu yang merupakan Wajib Pajak dari luar negeri, kecuali mereka yang dikecualikan sebagai Badan Usaha Tetap. Pengertian individu sebagai Wajib Pajak dari luar negeri dijelaskan di Pasal 2 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984. Ini mencakup orang perorangan yang tidak mempunyai kediaman di Indonesia, orang perorangan yang tinggal di Indonesia selama kurang dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, dan entitas usaha yang bukan berasal dari Indonesia atau tidak memiliki pusat operasional di Indonesia, namun masih menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melakukan kegiatan atau usaha melalui perwakilan tetap di Indonesia.

Pajak akhir sebesar 20% dari total pendapatan bruto yang diterima dijelaskan dalam Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang diperoleh dari:

- a. Beragam jenis ganjaran, seperti bunga, dalam bentuk premi, diskon, atau insentif terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman.
- b. Pendapatan dari dividen.
- c. Keuntungan yang diperoleh dari pengurangan utang.
- d. Pembayaran premi swap serta transaksi lindung nilai dan sejenisnya.
- e. Hadiah serta penghargaan yang diterima.
- f. Hak penggunaan aset yang melibatkan royalti, biaya sewa, dan pendapatan terkait lainnya.

- g. Penghargaan yang terkait dengan pelayanan, pekerjaan, dan aktivitas.
- h. Pensiun dan pembayaran berkala secara finansial.
- i. Manfaat yang diperoleh dari menghilangkan kewajiban pembayaran utang.

Di samping memungut pajak penghasilan, Wajib Pajak Luar Negeri yang terkena Pajak Pasal 26 juga dikenai tarif pajak sebesar 20% (sebagai tarif final) dari keuntungan bersih atas pendapatan yang berasal dari:

- a. Penghasilan dari penjualan kekayaan atau aset di Indonesia.
- b. Biaya premi asuransi dan reasuransi yang diserahkan kepada perusahaan asuransi internasional secara langsung atau melalui perantara.

Ketentuan tarif 20% ini berlaku dalam beberapa situasi:

- a. Biaya akhir sebesar 20% dari laba bersih juga dikenakan saat saham perusahaan yang berdiri atau memiliki kantor pusat di negara dengan perlindungan pajak dialihkan atau dijual, termasuk perusahaan yang memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- b. Pendapatan yang sudah dikenai pajak sebesar 20% di Indonesia juga mencakup kewajiban pajak, namun dapat dikecualikan jika Wajib Pajak memilih untuk mengalokasikan kembali penghasilannya dalam bentuk investasi di negara ini.

Penting untuk diingat bahwa dalam kesepakatan pajak antara Indonesia dan negara lain, terdapat variasi tarif yang dapat diterapkan. Tarif tersebut mampu mengurangi tarif pajak standar sebesar 20%, sementara ada kesepakatan tertentu yang bahkan mungkin memberlakukan tarif 0%.

### **7.3.7 Pajak Penghasilan Bersifat Final**

Pajak Penghasilan Final merupakan bentuk pajak langsung yang dikenakan pada pendapatan khusus dari sumber tertentu, menggunakan tarif yang telah ditetapkan khusus untuk pendapatan dari sumber tersebut. Tujuan dari pengenaan PPh Final adalah untuk menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan (PPh) dan mengurangi beban administratif baik bagi Wajib Pajak serta lembaga fiskal yang mengurusnya, yaitu Direktorat Jenderal

Pajak, menjamin kepastian hukum kepada Wajib Pajak melalui Pajak Penghasilan Final.

Pasal 4 dari regulasi pajak pendapatan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Akhir akan diberlakukan terhadap pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan properti seperti tanah dan/atau bangunan, kegiatan yang berkaitan dengan properti, pelayanan konstruksi, dan penyewaan tanah dan/atau bangunan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penetapan tarif pajak untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan total pendapatan bruto (omset) yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 2.

Rumus Pajak Penghasilan Final:

$$\text{Pasal 4 Ayat (2)} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Peredaran Bruto}$$

Tarif pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 bervariasi tergantung pada kategori yang bersangkutan. Pemerintah telah menetapkan kisaran tarif yang berbeda-beda untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, dimulai dari 0.1% sebagai yang terendah hingga 25% sebagai yang tertinggi.

### 7.3.8 Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak Pasal 15 atas penghasilan merupakan jenis pajak yang dikurangkan secara otomatis dari individu atau entitas pajak yang bergerak di sektor-sektor tertentu seperti perusahaan pengeboran minyak, industri pelayaran, perusahaan asuransi asing, penerbangan internasional, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam proyek "*build-operate-transfer*" sering digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, sistem kereta bawah tanah, dan proyek infrastruktur lainnya.

Pajak Pasal 15 berlaku pada bayaran atau penggantian dalam bentuk uang atau nilainya yang setara yang diterima oleh individu yang membayar pajak sesuai dengan kesepakatan kontrak untuk mengangkut orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain di Indonesia, atau dari suatu tempat di Indonesia menuju destinasi di luar negeri.

Perusahaan penerbangan domestik di Indonesia yang merupakan subjek pajak (SPDN Badan) harus membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dari perjanjian charter, termasuk penghasilan dari penyewaan ruang pesawat untuk transportasi penumpang dan barang.

Rumus Pajak Penghasilan Pasal 15:

$PPH \text{ terutang} = 30\% \times \text{norma Penghitungan Penghasilan Netto}$

Penghasilan netto dihitung dengan mengambil 6% dari peredaran bruto, yang pada akhirnya menghasilkan tarif pajak penghasilan terutang sebesar 1,8% dari peredaran bruto (1,8% berasal dari 6% yang merupakan 30% dari peredaran bruto).

Bayaran sebesar 1,8% untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 bisa diartikan sebagai pengurangan pajak yang akan ditambahkan ke total Pajak Penghasilan yang harus diungkapkan dalam laporan pajak tahunan pada tahun tersebut.

## 7.4 Pajak Khusus

### 7.4.1 Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekarang melaksanakan peran yang sebelumnya diemban oleh Pajak Penjualan karena dinilai tidak cukup efektif dalam menanggapi kegiatan ekonomi masyarakat dan belum mencapai tujuan pembangunan, seperti peningkatan pendapatan negara, peningkatan ekspor, dan pemerataan beban pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan pada pembelian barang-barang dan layanan yang dikonsumsi di dalam suatu negara, termasuk baik barang maupun layanan konsumsi di wilayah pabean. Menurut amendemen ketiga Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dari Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, secara keseluruhan menjelaskan PPN sebagai pajak yang diberlakukan pada barang dan jasa yang digunakan di daerah pabean. PPN diterapkan dengan tarif yang bervariasi pada setiap tahap produksi dan distribusi.

Rumus Pertambahan Nilai:

$$PPN = \text{tarif PPN (11\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara terus-menerus mengalami perubahan sejalan dengan penerapan regulasi hukum terbaru. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), perubahan tersebut terjadi, bagian IV Pasal 7 ayat (1) yang membahas PPN, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% akan mengalami peningkatan secara bertahap. Dimulai dengan kenaikan

menjadi 11% pada tahun 2022, dan progresif mencapai 12% pada tahun 2025 nanti.

Beberapa produk yang termasuk dalam kategori barang kena pajak akan dikenai tarif PPN terbaru sesaat setelah tarif sebesar 11% diberlakukan. Mulai dari perangkat elektronik, pakaian, sampai layanan-layanan seperti pulsa dan streaming online. Secara keseluruhan, ini merupakan daftar produk yang akan dikenai tarif PPN sebesar 11%.

- a. Biaya yang harus dibayar untuk produk atau layanan dalam bentuk pajak yang berasal dari luar wilayah bea cukai dan masuk ke dalam wilayah tersebut, contohnya layanan streaming musik.
- b. Penjualan atau layanan yang dikenai pajak oleh perusahaan yang wajib membayar pajak.
- c. Bangunan yang dibuat oleh individu atau entitas di luar lingkup usaha atau pekerjaan mereka sendiri, seperti contohnya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk struktur bangunan.
- d. Transfer aset oleh Subjek Pajak yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk dijual, asalkan PPN yang dibayarkan saat pembelian dapat diakui sebagai kredit pajak.

Rumus penghitungan PPnBM:

$$\text{PPnBM} = \text{DPP} \times \text{Tarif PPnBM}$$

Rumus penghitungan PPN untuk barang mewah:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times (\text{Harga Barang} - \text{PPnBM})$$

Pengelompokan tarif pajak penjualan pada barang-barang mewah terbagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Beberapa jenis barang seperti transportasi umum tertentu, peralatan rumah tangga, peralatan pendingin, properti mewah, televisi, dan minuman non-alkohol dikenai pajak pada tingkat 10%.
- b. Pajak sebesar 20% dikenakan pada impor kendaraan bermotor tertentu, peralatan fotografi, karpet, dan peralatan olahraga.
- c. Kendaraan bermotor berat yang menggunakan bahan bakar solar dikenai tarif pajak sebesar 25%.
- d. Minuman *free* alkohol, barang import yang berbahan kulit, kristal, bis, dan barang pecah belah dikenai tarif pajak sebesar 35%

### **7.4.2 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, perhutanan dan Perkebunan**

Pajak yang diterapkan oleh pemerintah pada properti berupa tanah dan/atau bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait dengan Pajak atas Properti. Aturan ini telah mengalami modifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB dikenal sebagai kewajiban pajak yang ditentukan berdasarkan nilai properti tersebut, yang meliputi nilai tanah dan/atau bangunan. Besarnya pajak tidak dipengaruhi oleh siapa yang membayar, tetapi lebih bergantung pada kondisi properti itu sendiri, yakni tanah dan/atau bangunan.

Rumus untuk perhitungan PBB dilakukan dengan sebagai berikut:

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times \text{NJKP} = 0,5\% \times (40\% \times (\text{NJOP tanah} + \text{NJOP bangunan}))$$

Nilai Penilaian yang Dikenai Pajak (NJKP) atau Nilai Penilaian adalah nilai yang dipakai dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan dan merupakan bagian dari Nilai Penjualan Objek Pajak. NJKP terkait erat dengan Nilai Penjualan Objek Pajak, dan bisa bervariasi antara 20% sampai 100% dari nilai jual objek pajak.

Menurut peraturan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000, sejumlah jenis sumber pajak seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan memiliki persentase Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 40%. Di sisi lain, untuk objek pajak di daerah pedesaan dan perkotaan, persentase NJOP adalah 40% untuk nilai di bawah Rp 1 miliar. Namun, persentase tersebut akan turun menjadi 20% apabila nilai NJOP melewati angka Rp 1 miliar.

Hukum yang disahkan pada tahun 1985 kemudian mengalami perubahan pada tahun 1994, memecah Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) ke dalam sejumlah kelompok, termasuk penilaian pajak properti (diperuntukkan bagi perseorangan dengan nilai jual properti di atas Rp 1.000.000.000), perkebunan (untuk lahan lebih dari 25 hektar yang dimiliki oleh BUMN, BUMS, atau melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta), dan kehutanan (kecuali area penebangan).

### **7.4.3 Pajak Daerah**

Pajak daerah dan pajak pusat yaitu jenis pajak yang dibedakan berdasarkan pihak yang mengumpulkannya. Pungutan pajak yang dikumpulkan oleh

pemerintah pusat disalurkan untuk keperluan pengeluaran negara, sementara pajak yang terkumpul oleh pemerintah daerah digunakan untuk mendukung pembangunan di wilayahnya.

Menurut penjelasan yang ada dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan kewajiban individu maupun entitas hukum untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah tanpa menerima imbalan langsung yang sebanding. Kewajiban ini dapat diterapkan dengan kekuatan hukum yang berlaku dan diperuntukkan untuk membiayai operasional pemerintahan daerah serta proyek Pembangunan.

Karakteristik atau unsur utama pajak daerah dapat disimpulkan, yaitu:

- a. Pajak dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pajak memiliki sifat memaksa, artinya wajib bagi pembayarannya.
- c. Pendapatan dari pajak digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan daerah.
- d. Tidak ada pengembalian imbalan langsung kepada pembayar pajak.

Pada tahun 2009, diterapkan UU Nomor 28 yang secara rinci mengatur sejumlah pajak di tingkat kabupaten/kota, termasuk 17 jenis seperti Pajak Reklame, Hiburan, Parkir, Hotel, Restoran, Air Tanah, Penerangan Jalan, Mineral Non-logam dan Batuan, Properti di Kawasan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **7.4.5 Bea Meterai**

Bea Meterai merupakan biaya yang harus diberlakukan pada dokumen segera setelah dokumen itu disahkan oleh pihak-pihak yang terlibat atau ketika dokumen itu diberikan kepada pihak lain, terutama jika dokumen tersebut dibuat oleh satu pihak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dokumen yang menjelaskan peristiwa yang terkait dengan ranah hukum perdata wajib dikenai Bea Meterai. Jenis dokumen tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Perjanjian tertulis, pernyataan tertulis, keterangan tertulis, atau dokumen serupa beserta salinannya; Instrumen keuangan dalam beragam format.

- b. Dokumen yang disusun oleh seorang notaris dengan lampiran, salinan, serta kutipannya.
- c. Dokumen yang disusun oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berserta salinannya, dan juga dokumen terkait dalam proses lelang, termasuk ringkasan, catatan, salinan, serta dokumen inti dari proses lelang.
- d. Dokumen transaksi instrumen keuangan, termasuk kontrak berjangka dalam format-variasi.
- e. Dokumen yang menunjukkan jumlah uang melebihi lima juta rupiah dalam nilai nominal.
- f. Dokumen lain yang diatur oleh aturan pemerintah.

Sesuai dengan peraturan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Bea Meterai wajib digunakan pada dokumen yang menjadi bukti dalam proses pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen yang semula diciptakan untuk tujuan tertentu dapat menjadi bukti dalam persidangan karena digunakan untuk keperluan yang berbeda dari tujuan awal pembuatannya.

Biaya Meterai yang disebutkan di Pasal 3 ditetapkan pada jumlah tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun, terdapat suatu ketentuan tambahan yang menyatakan bahwa biaya ini dapat diubah sesuai dengan kondisi ekonomi nasional dan pendapatan masyarakat. Ini meliputi potensi untuk menyesuaikan nilai nominal dokumen yang dikenai Bea Meterai serta mengubah tarif Bea Meterai sesuai dengan situasi ekonomi negara dan pendapatan masyarakat. Dokumen yang dikenai tarif tetap yang berbeda juga dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah, kebijakan moneter, dan sektor keuangan. Penetapan nilai nominal dokumen yang dikenai Bea Meterai, tarif Bea Meterai, atau dokumen dengan tarif tetap yang berbeda akan dilakukan melalui peraturan pemerintah setelah berkoordinasi dengan DPR RI.

**Tabel 7. 4:** Perbedaan Bea Materai Lama dan Baru

<b>Bea Meterai Baru</b>		<b>Bea Meterai Lama</b>	
a.	Surat pembayaran yang bernilai kurang dari Rp250.000,00 tidak perlu diberi meterai.	a.	Dokumen pembayaran senilai hingga Rp5.000.000,00 tidak perlu diberi meterai.
b.	Dokumen yang memiliki nilai antara Rp250.000,00 hingga Rp1.000.000,00 akan dikenai	b.	Dokumen yang nilainya melebihi Rp5.000.000,00 harus membayar bea meterai sebesar Rp10.000,00.

biaya meterai sejumlah Rp3.000,00.	
c. Pembayaran yang nilainya melebihi Rp1.000.000,00 akan dikenai biaya meterai sebesar Rp6.000,00 dalam dokumen pembayarannya.	

## Daftar Pustaka

- Agus Purwaji, W. dan H.M. (2016) *Pengantar Akuntansi 1*. 2nd edn. Salemba Empat Jakarta.
- Baridwan, Z. (2000) 'Perkembangan Teori dan Penelitian Akuntansi', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15(4), pp. 486–497.
- Devina, S. and Waluyo, W. (2016) *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kecepatan, Keamanan 75 dan Kerahasiaan Serta Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak terhadap Penggunaan e-Filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci*, *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, T.D.W. (2017) *Akuntansi Keuangan Menengah*. 1st edn. Salemba Empat Jakarta.
- Dwi Martani, S.V. (2017) *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. 2nd edn. Jakarta: Salemba Empat Jakarta.
- Foundation (2021) *IFRS - International Accounting Standards Board*. Available at: <https://www.ifrs.org/groups/international-accounting-standards-board/> (Accessed: 27 October 2023).
- Foundation, I. (2018) *Conceptual Framework for Financial Reporting*.
- Giri, E.F. (2017) *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri (2011) *Teori Akuntansi*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Sofyan S. (2011) *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hermain, H. et al. (2019) *Pengantar akuntansi 1, Madenatera*.
- IASB (2021) *IFRS - IFRS Interpretations Committee*. Available at: <https://www.ifrs.org/groups/ifrs-interpretations-committee/> (Accessed: 27 October 2023).
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009) *SAK ETAP*. 4th edn. Jakarta: Salemba Empat Jakarta.

- Kasmir (2016) *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kemenkeu (2023) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak*.
- Keown, Martin, P. (2011) *Foundations Of Finance*. 7th edn. Pearson.
- Keown, Martin, T. (2011) *Financial Management, Principles And Applications*. 11th edn. Pearson.
- Kusoy, N.A. and Priyadi, M.P. (2020) *Pengaruh profitabilitas, leverage dan rasio aktivitas terhadap pertumbuhan laba, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Latuconsina, Y.M. (2019) 'Logika Menyusun Jurnal Umum Dalam Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa', *Jurnal Ilmu Ekonomi Adventage*, 8(1), pp. 15–20.
- Mardiasmo, M.B.A. (2011) 'Perpajakan (Edisi Revisi)', Penerbit Andi [Preprint].
- Marsyahrul, T. (2005) *Introduction Taxation, Jakarta: Grasindo*.
- Martani, D. (2012) *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat Jakarta.
- Martono dan Agus, H. (2008) *Manajemen Keuangan*. 2nd edn. Yogyakarta: Ekonisia.
- Munawir, S. (2005) *Auditing Modern Buku II*. Yogyakarta: BPFE.
- Panggabean, H.S. (2015) 'Analisis Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Perum Perumnas Regional I Medan (PSAK No. 44) Dibandingkan dengan SAK No. 23 dalam Kaitannya dengan Kewajaran Penyajian Laba Rugi'.
- Priantara, D. (2012) 'Perpajakan Indonesia', *Jakarta: Mitra Wacana Media* [Preprint].
- Riyanto, B. (2013) *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Empat. Yogyakarta: BPFE.
- Sartono, A. (2012) *Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi)*. Empat. Yogyakarta: BPFE.
- Soemarso, S.R. (2005) *Akutansi: Suatu Pengantar*. Edisi 5 Re. Jakarta: Salemba Empat.

- Spiceland, C., Spiceland, D. and Njoroge, P.K. (2018) *Tourist Trap: The new lease accounting standard and debt covenants*, *Journal of Accounting Education*. Elsevier.
- Suci, T.S.M., Karamoy, H. and Rondonuwu, S. (2019) *Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado, Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*.
- Susanti, W. et al. (no date) 'Analisis Capital Budgeting Sebagai Sarana Pengambilan', 7, pp. 1–10.
- Susanti, Y. and Agustin, S. (2015) 'FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES', 4(September).
- Warfield, D.E.K.J.J.W.T.D. (2010) *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Warfield, Kieso, D.E. (2010) *Akuntansi Intermediate, Akuntansi Intermediate*.
- Warren, C.S., Reeve, J.M. and Fees, P.E. (2005) *Accounting : pengantar akuntansi*. Terjemahan. Edited by A. Farahmita, Amanugrahani, and T. Hendrawan. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsono (2003) *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Malang: Bayu Media.
- Weygandt, J.J., Kimmel, P.D. and Kieso, D.E. (2018) *Financial accounting with international financial reporting standards*. John Wiley & Sons.
- Wulandari, W., Salsabila, D.I. and Utara, I.S. (2023) 'Deflasi jurnal ekonomi', 1(1).
- Yusuf (2005) 'Siklus Akuntansi', *Kutipan/ Menurut para ahli*, p. 230.



## Biodata Penulis



**Winda Ayu Virginia, S.Kom., M.Ak.,** lahir di Ambon, pada 29 April 1988. riwayat pendidikan berawal di SD Negeri 64 Ambon, melanjutkan ke SLTP Negeri 4 Jambi dan selanjutnya ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Swasta Sejahtera Jakarta Utara mengambil konsentrasi Akuntansi, kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi pada Tahap Diploma 3 (D3) di Program studi Manajemen Informatika AMIK MILAN DHARMA Baubau, Strata 1 (S1) Jurusan Sistem Informasi Konsentrasi Sistem Informasi Akuntansi di STMIK AKBA Makassar, dan selanjutnya menyelesaikan Program Magister (S2) Akuntansi pada Universitas Muslim Indonesia Makassar. Penulis memiliki kepakaran dibidang bisnis dan komptersiasi akuntansi. Penulis aktif dalam berbagai komunitas yang mendukung pengembangan UMKM serta memiliki beberapa mitra UMKM. Penulis terlibat dalam beberapa project yang dalam pembuatan aplikasi akutansi dan perkantoran yang bekerjasama dengan pihak swasta maupun pemerintah, penulis juga aktif dalam berbagai kepanitiaan dan menjadi salah satu dewan redaksi pada jurnal ilmiah JEKO Politeknik baubau.



**Andriani Saputri, S.E., M.Ak.,** lahir di Baubau, pada 6 Mei 1995. Riwayat pendidikan berawal di SD Negeri 3 Nganganaumala (Baubau), melanjutkan ke SMP Negeri 2 Baubau dan selanjutnya ke SMA Negeri 2 Baubau. beranjak remaja maka ia lanjutkan Pendidikan Tinggi pada Tahap Strata 1 (S1) di Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (Semarang), dan Strata 2 (S2) diselesaikan di Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (Semarang).



**Herlina Ilyas, S.Ak., M.Ak.**, lahir di Majene, pada 29 Juni 1994. riwayat pendidikan berawal di SD Negeri Nomor 02 Kampung Baru (Majene), melanjutkan ke SMP Negeri Nomor 02 Kampung Baru (Majene) dan selanjutnya ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Majene, beranjak remaja maka ia lanjutkan Pendidikan Tinggi pada Tahap Strata 1 (S1) di Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar, dan Strata 2 (S2) diselesaikan di Jurusan Akuntansi Universitas Muslim Indonesia (UMI).



**Hesti Setiorini, S.Akt., M.Ak.**, lahir di Magelang, pada 28 Maret 1980. riwayat pendidikan berawal di SD Negeri Nomor 39 Desa Paninjau Bengkulu Utara, melanjutkan ke SMP Negeri Nomor 6 Desa Paninjau Bengkulu Utara dan selanjutnya ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Argamakmur (Bengkulu Utara), beranjak remaja maka ia lanjutkan Pendidikan Tinggi pada Tahap Strata 1 (S1) di Jurusan Akuntansi Universitas Terbuka, dan Strata 2 (S2) diselesaikan di Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu.



**Olga Theolina Sitorus, S.E., M.Si.**, lahir di Bagan Batu, pada 15 Juli 1985. Riwayat pendidikan berawal di SD RK Serdang Murni II Lubuk Pakam, Deli Serdang, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Lubuk Pakam dan selanjutnya ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, beranjak remaja maka ia lanjutkan Pendidikan Tinggi pada Tahap Strata 1 (S1) di Jurusan Akuntansi Universitas Nommensen Medan, dan Strata 2 (S2) diselesaikan di Sekolah Pascasarjana Jurusan Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Saat ini beliau aktif bekerja sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan.



**Ayu Desita Sari, S.E., M.Akun.**, lahir di Sampit, 18 Desember 1995. Saat ini bedomisili di Jember, Jawa Timur. Tahun 2017 penulis meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jember dan di tahun 2019 meraih gelar Magister Akuntansi di Universitas Jember. Mengawali karir sebagai praktisi Akuntansi pada salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Jember pada tahun 2017, kemudian mengawali karir sebagai dosen tetap prodi D3

Akuntansi pada salah satu PTS di Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2021 hingga saat ini. Penulis juga aktif sebagai tutor pada Universitas Terbuka hingga saat ini. Komitmen sebagai dosen juga penulis wujudkan dengan aktif di berbagai "Penelitian dan Pengabdian" kepada "Masyarakat di bidang" Akuntansi.



**Amalina Nur Arifah, S.E., M.Sc.**, lahir di Sleman, pada 11 Agustus 1994. riwayat pendidikan berawal di SD Negeri Jongkang, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Ngaglik dan selanjutnya ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Mlati, mengambil jurusan Akuntansi pada Tahap Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Strata 2 (S2) diselesaikan di Jurusan Sains Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Sejak 2013 lalu, aktif

mengikuti pelatihan dan seminar nasional. Pada tahun 2022 menjadi tenaga pendidik di Universitas Siber Muhammadiyah serta aktif menjadi pembicara dalam pelatihan akuntansi.





**Cendekiawan  
Inovasi  
Digital  
Indonesia**



Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia  
[press.ceddi@gmail.com](mailto:press.ceddi@gmail.com)  
<https://penerbit.ceddi.id>